

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung dalam Rapat Paripurna secara tepat waktu.

Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan regulasi tersebut, LKPJ dimaknai sebagai laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung serta memuat pertanggungjawaban kinerja yang secara langsung mengarah pada pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, kebijakan strategis yang ditetapkan serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. selain itu, LKPJ ini memuat hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai bentuk kepatuhan

terhadap amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan LKPJ ini juga merujuk pada dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Kebijakan perencanaan dan penganggaran tersebut tidak terlepas dari perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai pada Tahun 2021 merupakan upaya bersama dari seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Temanggung. Hal ini merupakan wujud implementasi inovasi dan kolaborasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Temanggung, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Temanggung secara luas, meskipun pada Tahun 2021 masih menjadi tahun yang penuh

dengan tantangan akibat bencana non alam Pandemi COVID-19. Patut disadari bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kabupaten Temanggung merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Temanggung pada masa yang akan datang.

Demikian LKPJ Bupati Temanggung Akhir Tahun Anggaran 2021 disampaikan, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Temanggung pada masa yang akan datang dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Temanggung sehingga terwujudnya Temanggung yang ***“Toto, Titi, Tentrem Marem dan Gandem”***. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

Temanggung,     Maret 2022

**BUPATI TEMANGGUNG,**



**H.M. AL KHADZIQ**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	I - 1
1.1 DASAR HUKUM .....	I - 1
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	I - 1
1.3 DATA UMUM DAERAH .....	I - 8
a. Data Geografis Wilayah .....	I - 8
b. Data Demografi .....	I - 11
c. Pertumbuhan Penduduk .....	I - 14
d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah .....	I - 15
e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan .....	I - 18
f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja .....	I - 19
g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan .....	I - 20
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD .....	II - 1
2.1 Latar Belakang .....	II - 1
2.2 Tujuan Perubahan .....	II - 1
2.3 Dasar Perubahan .....	II - 2
2.4 Perubahan Penjabaran .....	II - 3
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....	III - 1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	III - 1
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 4
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III - 92
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	III -162
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....	III - 186
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 .....	III - 193
BAB IV CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN .....	IV - 1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan .....	IV - 1
a. Dasar Hukum .....	IV - 1
b. Gambaran Umum .....	IV - 2

c. Target Kinerja .....	IV - 2
d. Realisasi .....	IV - 4
4.2 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Daerah .....	IV - 14
4.3 Permasalahan dan Kendala .....	IV - 14
4.4 Saran dan Tindak Lanjut .....	IV - 14
BAB V PENUTUP .....	V - 1

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 .....	I - 4
Tabel 1.2	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung .....	I - 8
Tabel 1.3	Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian .....	I - 10
Tabel 1.4	Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di Tiap Kecamatan Tahun 2021 .....	I - 11
Tabel 1.5	Jumlah dan kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021 .....	I - 12
Tabel 1.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021 ....	I - 13
Tabel 1.7	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2021	I - 14
Tabel 1.8	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021 .....	I - 15
Tabel 1.9	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung .....	I - 16
Tabel 1.10	Profil Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Temanggung	I - 17
Tabel 1.11	Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 .....	I - 19
Tabel 1.12	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kabupaten Temanggung Temanggung Tahun 2021 .....	I - 19
Tabel 1.13	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021 .....	I - 20
Tabel 3.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	III - 4
Tabel 3.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	III - 92
Tabel 3.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan .....	III - 162
Tabel 3.4	Kebijakan Strategis Daerah dalam rangka Penyelesaian Masalah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 .....	III - 186
Tabel 3.5	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2020 .....	III - 193
Tabel 4.1	Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 .....	IV - 7

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah .....	I - 9
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 dan Target Tahun 2017-2021 .....	I - 14

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Dasar Hukum**

Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada . Sejarah Temanggung mulai tercatat pada Prasasti Wanua Tengah III Tahun 908 Masehi yang ditemukan penduduk Dusun Dunglo Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung pada bulan November 1983. Prasasti ini menggambarkan bahwa Temanggung semula berupa wilayah kademangan yang gemah ripah loh jinawi di mana salah satu wilayahnya yaitu Pikatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Nomor 11 Tanggal 7 April 1826, Raden Ngabehi Djojonegoro ditetapkan sebagai Bupati Menoreh yang berkedudukan di Parakan, dengan gelar Raden Tumenggung Aria Djojonegoro. Setelah perang Diponegoro berakhir, beliau kemudian memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung. Melalui Resolusi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 4 Tanggal 10 November 1834 yang muncul karena usulan Raden Tumenggung Aria Djojonegoro kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia, nama Kabupaten Menoreh disetujui perubahan namanya menjadi Kabupaten Temanggung. Atas dasar ini maka Tanggal 10 November ditetapkan menjadi Hari Jadi Kabupaten Temanggung.

### **1.2. Visi Dan Misi Kepala Daerah**

#### **1. Visi Pembangunan Daerah**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.



Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## **2. Misi Pembangunan Daerah**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### **1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama,

mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Masing-masing sasaran pada setiap misi diukur dengan indikator sasaran yang secara rinci dijabarkan table 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah  
Tahun 2018-2023

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM</b>				
<b>MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>BIDANG</b>
<b>Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya.</b>	1. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka kemiskinan	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<b>Pendidikan</b>
			2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	
		2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang Kesehatan	3. Angka Harapan Hidup (AHH)	<b>Kesehatan</b>
			4. Indeks Kinerja RSUD	
		3. Meningkatnya budaya literasi masyarakat	5. Persentase peminjam di perpustakaan	<b>Perpustakaan</b>
		4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	6. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	<b>Pemuda dan Olah Raga</b>
			7. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM DAN GANDEM</b>				
<b>MISI 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>BIDANG</b>
		5. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal	8. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IKP)	<b>Kebudayaan</b>
		6. Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	9. Indek Gotong Royong	<b>Pemerintahan Umum</b>
			10. Indek Toleransi	
		7. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	11. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	<b>Pengendalian Penduduk</b>
		8. Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>
			13. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	
		9. Meningkatnya Penanganan, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	14. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	<b>Sosial</b>

<b>MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan</b>				
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>URUSAN / BIDANG</b>
<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan</b>	3. Pertumbuhan Ekonomi 4. Pendapatan per Kapita 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Ketimpangan Pendapatan	1. Meningkatnya kesejahteraan petani	15. Tingkat ketersediaan energi perkapita	<b>Pertanian</b>
			16. Tingkat ketersediaan protein perkapita	
		17. Tingkat ketersediaan lemak perkapita		
		2. Meningkatnya kedaulatan pangan	18. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<b>Pangan</b>
			19. Tingkat Konsumsi Ikan	<b>Kelautan dan Perikanan</b>

**MISI 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan**

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>URUSAN / BIDANG</b>
		3. Meningkatnya pariwisata daerah	20. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	<b>Pariwisata</b>
		4. Meningkatnya investasi sektor riil	21. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	<b>Perindustrian</b>
			22. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<b>Perdagangan</b>
			23. Persentase Koperasi sehat	<b>Koperasi dan UKM</b>
			24. Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	
			25. Indek Kemudahan Berusaha	<b>Penanaman Modal</b>
			26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<b>Tenaga Kerja</b>
		5. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	27. Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
			28. Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	
			29. Persentase perumahan dan Permukiman layak huni	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>
			30. Persentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	<b>Perhubungan</b>
		6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	31. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<b>Lingkungan Hidup</b>

<b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>BIDANG</b>	
<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.</b>	7. Indek Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya kualitas manajemen Pemerintahan	32. Indek Perencanaan Pembangunan Daerah	<b>Perencanaan</b>	
			33. Persentase Ketercapaian Kinerja pembangunan daerah		
	34. Manajemen Risiko Indek (MRI)				
	8. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		35. Indeks Inovasi Daerah	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>	
			36. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	<b>Keuangan</b>	
	37. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)				
	38. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)		<b>Administrasi Pemerintahan</b>		
	39. Indek Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ)				
	40. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)				
	41. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		<b>Pengawasan</b>		
	42. Indeks Profesionalitas ASN		<b>Kepegawaian dan Diklat</b>		
	43. Indeks <i>Merit System</i>				
	44. Indeks Manajemen Kearsipan		<b>Kearsipan</b>		
	45. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu		<b>Sekretariat Dewan</b>		
			2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	46. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<b>Komunikasi dan Informatika</b>
				47. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	

MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	BIDANG
			48. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil	Adminduk
			49. Rata-Rata IKM di Kecamatan	Kewilayahan
		3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	50. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			51. Persentase desa yang berpredikat mandiri	
		4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	52. Indeks Rasa Aman	Ketentraman dan Ketertiban Umum
		5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	53. Indeks Resiko Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum_ Kebencanaan

### 1.3. Data Umum Daerah

#### a. Data Geografis Wilayah

##### 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah ± 87.065 Ha dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2  
Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Temanggung

No	Batas Wilayah	Kabupaten Lain	Kecamatan yang berbatasan
1	Sebelah Utara	Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang	Bejen, Kandangan, Gemawang, Candirotro
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Magelang	Kranggan, Selopampang, Tlogomulyo, Pringsurat
3	Sebelah Barat	Kabupaten Wonosobo	Kledung, Ngadirejo, Wonoboyo
4	Sebelah Timur	Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang	Kaloran, Kandangan, Kranggan, Pringsurat

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

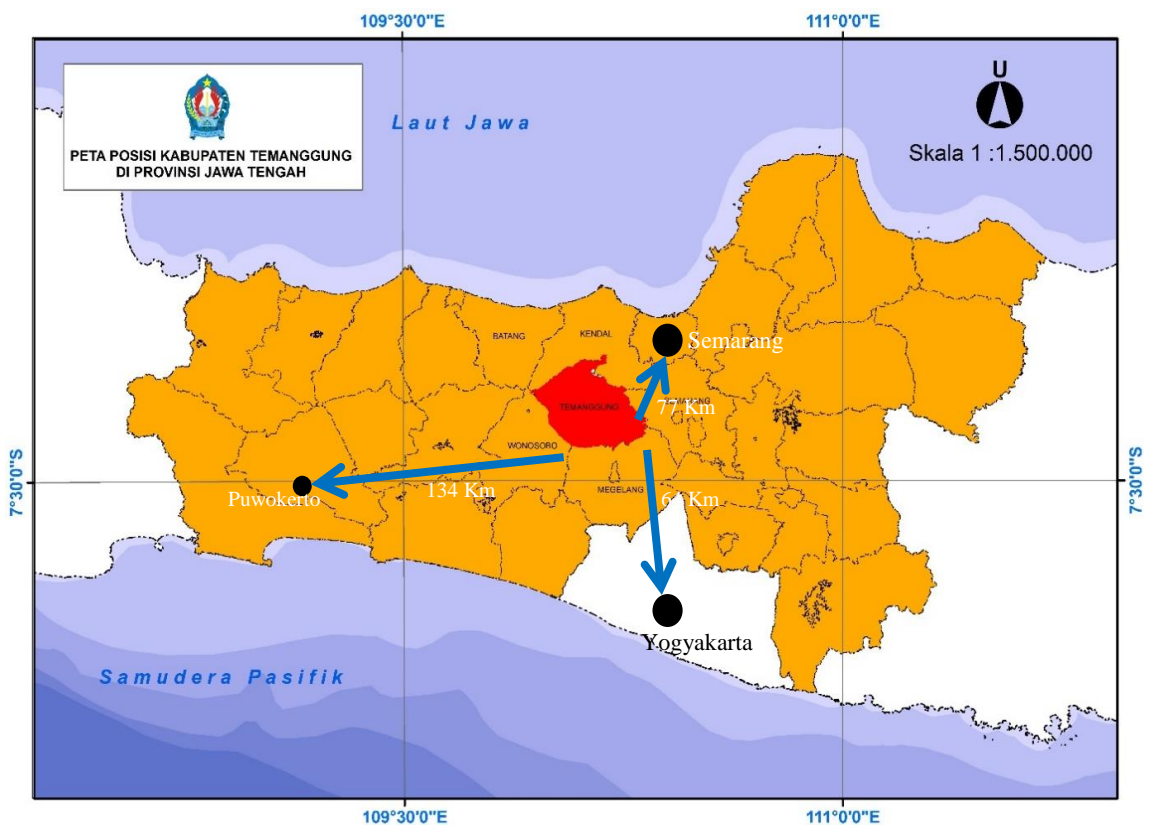
## 2) Letak dan Kondisi Geografis

### a) Posisi Astronomis

Secara astronomis, Kabupaten Temanggung berada pada koordinat  $110^{\circ}23' - 110^{\circ}46'30''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}14' - 7^{\circ}32'35''$  Lintang Selatan.

### b) Posisi Geografis

Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah tiga pusat kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

Gambar 1.1  
Peta Posisi Kabupaten Temanggung terhadap Provinsi Jawa Tengah

### c) Kemiringan Lahan

Topografi Wilayah Kabupaten Temanggung kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian



Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro (3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

#### d) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400 - > 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara. Apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi ketinggian Kabupaten Temanggung terbagi dalam 5 (lima) wilayah ketinggian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3  
Pembagian Wilayah Kab. Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonoboyo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonoboyo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu, Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonoboyo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber: Statistik Kabupaten Temanggung, Tahun 2021

### e) Geologi

Dilihat dari sisi geologi, lahan seluas 82.675 Ha jenis tanah di Kabupaten Temanggung meliputi: Latosol coklat (32,13%), Latosol coklat kemerahan (9,53%), Latosol merah kekuningan (35,33%), Regosol (20,14%), dan Andosol (2,60%).

Selanjutnya apabila dilihat dari jenis batuan dan mineral yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan menjadi: 1). Batuan Andesit, 2). Batu gamping, 3). Batu kali, 4). Batu tras, 5). Bentonit, 6). Diatomae, 7). Kerikil, dan 8). Pasir. Apabila dilihat luas wilayah secara administrasi, kemiringan dan ketinggian disebabkan karena metoda dan pendekatan penghitungan.

### b. Data Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung per kecamatan pada tahun 2021 berjumlah 800.276 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 402.957 jiwa (50,35%) dan perempuan sebanyak 397.319 jiwa (49,45%). Sebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk di tiap kecamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4  
Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin di  
Tiap Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%	
1	BULU	25.013	50.82	24.202	49,18	49.215	6,15	103,35
2	TEMBARAK	16.059	50.98	15.442	49,02	31.501	3,94	104,00
3	TEMANGGUNG	41.409	49.65	41.995	50,35%	83.404	10,42	98,60
4	PRINGSURAT	26.423	50.09	26.323	49,91%	52.746	6,59	100,38
5	KALORAN	23.200	50.11	23.095	49,89%	46.295	5,78	100,45
6	KANDANGAN	26.824	50.58	26.206	49,42%	53.030	6,63	102,36
7	KEDU	29.943	50.52	29.321	49,48%	59.264	7,41	102,12
8	PARAKAN	27.260	50.36	26.870	49,64%	54.130	6,76	101,45
9	NGADIREJO	28.940	50.46	28.415	49,54%	57.355	7,17	101,85
10	JUMO	15.268	50.24	15.121	49,76%	30.389	3,8	100,97
11	TRETEP	10.915	51.1	10.447	48,9%	21.362	2,67	104,48
12	CANDIROTO	16.670	50.34	16.446	49,66%	33.116	4,14	101,36
13	KRANGGAN	24.615	49.65	24.963	50,35%	49.578	6,2	98,61
14	TLOGOMULYO	11.833	50.99	11.374	49,01%	23.207	2,9	104,04

No	Kecamatan	Jenis Kelamin				Sebaran		Rasio Jenis Kelamin
		Pria	%	Wanita	%	Kecamatan	%	
15	SELOPAMPANG	10.235	49,65	10.379	50,35%	20.614	2,58	98,61
16	BANSARI	12.384	50,72	12.032	49,28%	24.416	3,05	102,93
17	KLEDUNG	14.300	50,69	13.908	49,31%	28.208	3,52	102,82
18	BEJEN	10.933	50,27	10.815	49,73%	21.748	2,72	101,09
19	WONOBOYO	13.577	50,72	13.190	49,28%	26.767	3,34	102,93
20	GEMAWANG	17.156	50,56	16.775	49,44%	33.931	4,24	102,27
<b>Jumlah</b>		<b>402.957</b>	<b>50,35</b>	<b>397.319</b>	<b>49,65</b>	<b>800.276</b>	<b>1.047</b>	<b>101,42</b>

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, data diolah

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin adalah 101,42%. Kecamatan Temanggung prosentase penduduknya paling tinggi yaitu 10,42% dari total jumlah penduduk Temanggung 800.276 atau sebesar 83.404 jiwa. Sedangkan Kecamatan Selopampang jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 2.58 % atau sebesar 20.614 jiwa.

Jumlah dan kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5  
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
1	BULU	43,04	49.215	6,15%	1.143
2	TEMBARAK	26,84	31.501	3,94%	1.174
3	TEMANGGUNG	33,39	83.404	10,42%	2.498
4	PRINGSURAT	57,27	52.746	6,59%	921
5	KALORAN	63,92	46.295	5,78%	724
6	KANDANGAN	78,36	53.030	6,63%	677
7	KEDU	34,96	59.264	7,41%	1.695
8	PARAKAN	22,23	54.130	6,76%	2.435
9	NGADIREJO	53,31	57.355	7,17%	1.076
10	JUMO	29,32	30.389	3,8%	1.036
11	TRETEP	33,65	21.362	2,67%	635
12	CANDIROTO	59,94	33.116	4,14%	552
13	KRANGGAN	57,61	49.578	6,2%	861
14	TLOGOMULYO	24,84	23.207	2,9%	934
15	SELOPAMPANG	17,29	20.614	2,58%	1.192

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Sebaran penduduk (%)	Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
16	BANSARI	22,54	28.208	3,05%	1.083
17	KLEDUNG	32,21	21.748	3,52%	876
18	BEJEN	68,84	26.767	2,72%	316
19	WONOBOYO	43,98	33.931	3,34%	609
20	GEMAWANG	67,11	28.208	4,24%	506
<b>Jumlah</b>		<b>870,65</b>	800,276	100%	919

Sumber: Dindikcapil Kabupaten Temanggung, data diolah

Jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dari 768.290 jiwa Tahun 2016 bertambah menjadi 800.276 jiwa pada Tahun 2021, atau dalam 5 (lima) tahun naik sejumlah 31.986 jiwa. Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut :

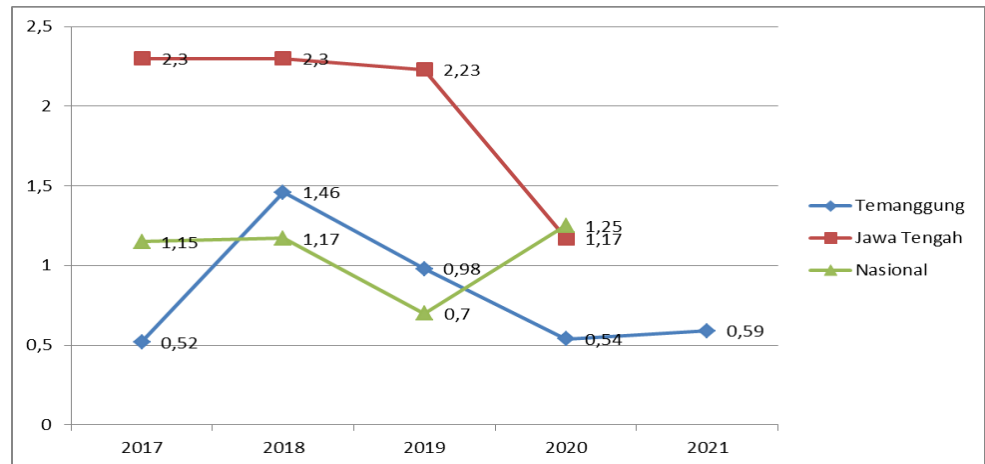
Tabel 1.6  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2021

No	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	BULU	47.361	48.119	48.785	48.898	49.215
2	TEMBARAK	30.490	30.739	31.107	31.167	31.501
3	TEMANGGUNG	81.207	82.620	83.157	83.275	83.404
4	PRINGSURAT	50.340	51.583	52.122	52.183	52.746
5	KALORAN	44.543	45.098	45.631	45.827	46.295
6	KANDANGAN	50.638	51.618	52.160	52.419	53.030
7	KEDU	57.273	58.072	58.889	59.060	59.264
8	PARAKAN	52.513	53.297	53.588	53.868	54.130
9	NGADIREJO	54.848	55.746	56.233	56.412	57.355
10	JUMO	29.519	29.656	30.002	30.068	30.389
11	TRETEP	20.894	20.906	21.113	21.208	21.362
12	CANDIROTO	32.469	32.621	32.956	32.997	33.116
13	KRANGGAN	47.467	48.465	49.021	49.360	49.578
14	TLOGOMULYO	22.573	22.710	22.832	22.900	23.207
15	SELOPAMPANG	19.821	19.986	20.175	20.252	20.614
16	BANSARI	23.423	23.984	24.203	24.307	24.416
17	KLEDUNG	27.049	27.606	27.902	28.053	28.208
18	BEJEN	21.004	21.278	21.482	21.559	21.748
19	WONOBOYO	26.077	26.172	26.294	26.431	26.767
20	GEMAWANG	32.780	33.274	33.612	33.811	33.931
<b>Jumlah</b>		<b>768.290</b>	<b>772.289</b>	<b>783.550</b>	<b>791.264</b>	<b>800.276</b>

Sumber : Dindikcapil Kabupaten Temanggung Tahun 2021

### c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dengan faktor penambah jumlah kelahiran dan migrasi masuk serta faktor pengurang jumlah kematian dan migrasi keluar pada suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung tergolong fluktuatif sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut ini:



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021, data diolah

Gambar 1.2

Laju Pertumbuhan Penduduk Temanggung, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar grafik di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, dan pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah dan dari Nasional.

Tabel 1.7

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2021

Kab/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk Tahun 2019	Kepadatan Penduduk Tahun 2019 (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Kab. Purworejo	1.091,49	769.880	705
Kab. Wonosobo	984,68	879.124	893
<b>Kab. Temanggung</b>	<b>870,65</b>	<b>800.276</b>	<b>919</b>
Kab. Magelang	1.102,93	1.299.859	1.179
Kota Magelang	18,12	127.846	7.055
<b>Rata-rata</b>			<b>2.150</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021, data diolah

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 1.8  
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Temanggung dan Kabupaten/Kota Kawasan PURWOMANGGUNG Tahun 2017-2021

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (ribu)					Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Kota. Magelang	121.474	121.872	122.111	<b>121.528</b>	127.848	0,30	0,33	0,20	0,27	5,20
Kab. Purworejo	714.574	716.477	718.316	769.880	769.880*	0,26	0,27	0,26	0,99	0,00
Kab. Wonosobo	784.207	787.384	790.504	879.124	879.124*	0,44	0,41	0,40	1,49	0,00
Kab. Magelang	1.268.396	1.279.625	1.290.591	1.299.859	1.299.859*	0,90	0,89	0,86	0,93	0,00
<b>Kab. Temanggung</b>	<b>772.289</b>	<b>783.550</b>	<b>791.264</b>	795.556	<b>800.276</b>	0,52	1,46	0,98	0,54	0,59
Rata-rata	732,19	737,78	742,56	773.19	<b>775.397</b>	<b>0,48</b>	<b>0,67</b>	<b>0,54</b>	<b>0,84</b>	<b>1,16</b>
<b>Rata-rata 3 tahun</b>						<b>0,57</b>				

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2021, data diolah

Keterangan : \* masih menggunakan data tahun yang lalu

#### d. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah.

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Temanggung didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari kedua peraturan tersebut maka Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu penataan kelembagaan organisasi pemerintahan secara keseluruhan pada akhir tahun 2020 dan berlaku efektif sejak awal tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan hal tersebut maka jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 1.9  
Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

No	Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	9	Bagian
2	Sekretariat DPRD	4	Bagian
3	Inspektorat	6	1 Sekretariat 5 Irbn
4	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	7	1 Sekretariat, 5 Bidang, 1 UPT Satuan Pendidikan
5	Dinas Kesehatan	32	1 Sekretariat, 4 Bidang, 27 UPT
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11	1 Sekretariat, 4 Bidang, 6 UPT
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	8	1 Sekretariat, 4 Bidang, UPT
8	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
9	Dinas Sosial	5	1 Sekretariat, 3 Bidang, 1 UPT
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
11	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	10	1 Sekretariat, 6 Bidang, 3 UPT
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
14	Dinas Perhubungan	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	6	1 Sekretariat, 3 Bidang, 2 UPT
17	Dinas Penanaman Modal	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5	1 Sekretariat, 3 Bidang, UPT
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	1 Sekretariat, 4 Bidang

No	Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja	Keterangan
22	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7	1 Sekretariat, 6 Bidang
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	1 Sekretariat, 3 Bidang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3	1 Sekretariat, 2 Bidang
25	Kecamatan	43	20 kecamatan, 23 Kelurahan

*Sumber Data: Bagian Organisasi Setda*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut maka jumlah eselon IV adalah 435 orang yang terdiri dari Jabatan Fungsional/Sub Koordinator 146 orang dan Jabatan Kasubag, Kasubid/Kasi 289 orang.

Profil Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya PNS di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 menurut golongan, eselon/jabatan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10  
Profil Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Temanggung

NO	JENIS DATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I.</b>	<b>Jumlah PNS</b>	<b>7.277</b>	<b>7.213</b>	<b>6.778</b>	<b>6.670</b>	<b>6.280</b>	<b>5.910</b>
	1. Golongan I	373	370	338	315	292	269
	2. Golongan II	1.322	1.301	1.128	1.082	903	862
	3. Golongan III	3.262	3.328	3.245	3.395	3.394	3.281
	4. Golongan IV	2.320	2.214	2.067	1.878	1.691	1.498
<b>II.</b>	<b>Jumlah Pejabat Struktural</b>	<b>763</b>	<b>784</b>	<b>710</b>	<b>633</b>	<b>624</b>	<b>618</b>
	1. Eselon I	0	0	0	0	0	0
	2. Eselon II (pimpinan Tinggi Pratama)	25	30	23	22	29	27
	3. Eselon III (administrator)	136	156	144	134	151	156
	4. Eselon IV (Pengawas)	566	598	543	477	444	289



NO	JENIS DATA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	5. Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	146
	6. Eselon V	52	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>
	Fungsional (Disetarakan)	0	0	0	0	0	146
<b>IV.</b>	<b>Jumlah PNS</b>	<b>7.277</b>	<b>7.213</b>	<b>6.778</b>	<b>6.670</b>	<b>6.280</b>	<b>5.910</b>
	Laki-Laki	3.438	3.336	3.089	2.959	2.743	2.542
	Perempuan	3.839	3.877	3.689	3.711	3.537	3.368

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2021, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 merupakan tahun dimana jumlah PNS di Kabupaten Temanggung berada di angka terendah selama 5 tahun terakhir yaitu sejumlah 5.910 orang dan hal tersebut menjadi pola yaitu semakin turun di tiap tahunnya. Semakin sedikitnya jumlah PNS diakibatkan moratorium pengadaan CPNS yang sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu. Dapat terlihat pula bahwa jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah pejabat struktural juga naik turun karena pola pembinaan karier terutama yang bersifat pengisian jabatan yang kosong tidak dapat dilakukan setiap saat, baik bagi jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) atau jabatan eselon III (Jabatan Administrator), atau jabatan eselon IV (Jabatan Pengawas).

Pada akhir Tahun 2021 Kabupaten Temanggung terdapat tambahan CPNS sejumlah 884 yang terdiri dari 857 CPNS umum, 25 dari Politeknik Keuangan Negara STAN, 2 dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang akan mulai aktif 1 Maret 2022. Sedangkan tambahan PPPK guru sampai dengan seleksi tahap ke-2 sejumlah 1.461 orang, yang rencananya PPPK akan mulai aktif 1 Juli 2022.

#### e. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 104,64 persen atau sebesar

Rp1.970.984.143.681,00 dari target sebesar Rp1.883.645.026.164,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi pendapatan menurut jenis pendapatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.11  
Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
4	PENDAPATAN DAERAH	1.883.645.026.164	1.970.984.143.681	104,64
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	271.757.079.716	363.114.976.223	133,62
4101	Pajak Daerah	45.834.000.000	52.832.251.119	115,27
4102	Retribusi Daerah	9.230.953.050	9.421.733.763	102,07
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.633.782.917	19.633.082.917	100,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	197.058.343.749	281.227.908.424	142,71
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458	99,74
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.381.088.184.781	1.385.928.637.379	100,35
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.711.522.667	151.917.958.079	94,53
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.088.239.000	70.022.572.000	99,91
4301	Pendapatan Hibah	571.300.000	571.300.000	100,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	69.516.939.000	69.451.272.000	99,91

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

#### f. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.877.946.263.818,00 atau sebesar 91,46 persen dari target belanja sebesar Rp2.053.340.949.247,00. Secara lengkap, ringkasan realisasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.12  
Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA	2.053.340.949.247	1.877.946.263.818	91,46
51	BELANJA OPERASI	1.373.906.713.450	1.232.191.731.511	89,69

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
5101	Belanja Pegawai	717.818.927.664	681.108.585.533	94,89
5102	Belanja Barang dan Jasa	545.881.225.141	458.556.089.481	84,00
5105	Belanja Hibah	92.739.551.295	89.549.068.997	96,56
5106	Belanja Bantuan Sosial	17.467.009.350	2.977.987.500	17,05
52	BELANJA MODAL	266.067.413.573	235.975.214.408	88,69
5201	Belanja Modal Tanah	9.000.000.000	58.015.740	0,64
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.896.202.382	75.016.039.240	89,42
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.858.878.990	83.641.090.248	90,07
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.198.762.300	71.874.050.162	96,87
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.792.569.901	5.309.106.018	91,65
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	321.000.000	76.913.000	23,96
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000	66,40
5301	Belanja Tidak Terduga	8.704.328.802	5.779.500.000	66,40
54	BELANJA TRANSFER	404.662.493.422	403.999.817.899	99,84
5401	Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000	5.656.124.477	99,66
5402	Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422	398.343.693.422	99,84
	Total Surplus/(Defisit)	(169.695.923.083)	93.037.879.863	(54,83)

Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021

#### g. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan terdiri penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara lengkap, ringkasan realisasi pembiayaan daerah menurut jenis pembiayaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.13  
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6	PEMBIAYAAN	0	0	0
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.943.242.545	170.685.562.258	99,85
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.943.242.545	170.673.307.258	99,84
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	12.255.000	0
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.247.319.462	1.243.879.610	99,72
6202	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.247.319.462	1.243.879.610	99,72
	Pembiayaan Netto	169.695.923.083	169.441.682.648	99,85
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0	262.479.562.511	0

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2021*

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **2.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan mendasarkan pada laporan realisasi semester I APBD berjalan. Perubahan APBD tersebut dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

#### **2.2. Tujuan Perubahan**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan tujuan :

1. Menyesuaikan perubahan penerimaan pendapatan asli daerah, dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah;

2. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Tahun Anggaran 2020;
3. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dengan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang memerlukan penanganan secara cepat dengan memerhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

### **2.3. Dasar Perubahan**

Perubahan APBD juga dilakukan seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal yang sangat mendasar perlu dilakukannya perubahan APBD adalah terjadinya pandemi Covid-19. Beberapa kebijakan atau peraturan perundangan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan lain yang berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan atau peraturan-peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
2. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/3017/keuda tanggal 28 april 2021 tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK NonFisik Bidang Kesehatan dan DAK NonFisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan T A. 2021
3. Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2805/keuda tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2021

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

#### **2.4. Perubahan Penjabaran**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sampai dengan akhir Semester I, yang di dasarkan pada perubahan penjabaran APBD, terdapat beberapa perubahan pada struktur APBD. Perubahan asumsi dasar dimaksud menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. Perubahan-perubahan tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, terutama terkait dengan penyesuaian/perubahan target pendapatan daerah. Perubahan/penyesuaian ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum akibat pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan kebijakan evaluasi atas penggunaan dana transfer dan dana desa ke daerah. Untuk Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kebijakan penyesuaian sesuai dengan kondisi riil serta potensi yang dapat di capai.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah juga mengalami koreksi sejalan dengan pendapatan daerah yang mengalami perubahan agar nilai defisit wajar. Perubahan belanja daerah tersebut disebabkan karena:

- a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan harus dilakukan penyesuaian belanja daerah karena kebijakan pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun kebijakan pemerintah daerah.
- b. Adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Adanya program/kegiatan yang memerlukan penyesuaian ataupun bersifat baru dalam rangka mendukung pencapaian target tahun anggaran berjalan, peningkatan pelayanan kepada

masyarakat, maupun dalam rangka persiapan pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2022.

### 3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah juga menyesuaikan dengan pendapatan daerah dan belanja daerah guna menutup defisit yang ada. Perubahan pembiayaan daerah disebabkan karena:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2020 yang harus digunakan dalam tahun berjalan.
- b. Penundaan penyertaan modal pada beberapa perusahaan milik daerah sebagai akibat kebijakan daerah;
- c. Penyesuaian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga berupa retensi.

Perubahan APBD juga seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan. Hal mendasar yang sangat perlu melakukan perubahan APBD adalah masih berlangsungnya pandemi Covid-19 pada tahun 2021 yang akhirnya berdampak pada kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi dimaksud. Beberapa kebijakan atau peraturan perundangan dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 yang berakibat pula pada perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah.



## **BAB III**

### **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

#### **3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Kabupaten Temanggung pada tahun 2021 terdiri dari:

a. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:

- 1) Pendidikan, dilaksanakan dalam 1 program, 4 kegiatan, dan 40 sub kegiatan;
- 2) Kesehatan, dilaksanakan dalam 3 program, 6 kegiatan, dan 43 sub kegiatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam 11 program, 14 kegiatan, dan 31 sub kegiatan;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 3 sub kegiatan;
- 5) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dilaksanakan dalam 5 program, 10 kegiatan, dan 20 sub kegiatan;
- 6) Sosial, dilaksanakan dalam 6 program, 10 kegiatan, dan 37 sub kegiatan.

b. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

- 1) Tenaga Kerja, dilaksanakan dalam 6 program, 7 kegiatan, dan 12 sub kegiatan;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan dalam 5 program, 9 kegiatan, dan 9 sub kegiatan;
- 3) Pangan, dilaksanakan dalam 3 program, 5 kegiatan, dan 5 sub kegiatan;
- 4) Pertanian, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 1 sub kegiatan;
- 5) Lingkungan Hidup, dilaksanakan dalam 8 program, 9 kegiatan, dan 17 sub kegiatan;

- 6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dilaksanakan dalam 3 program, 4 kegiatan, dan 6 sub kegiatan;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan, dan 12 sub kegiatan;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan dalam 3 program, 6 kegiatan, dan 13 sub kegiatan;
- 9) Perhubungan, dilaksanakan dalam 1 program, 7 kegiatan, dan 10 sub kegiatan;
- 10) Komunikasi dan Informatika, dilaksanakan dalam 2 program, 3 kegiatan, dan 16 sub kegiatan;
- 11) Koperasi dan UKM, dilaksanakan dalam 3 program, 3 kegiatan, dan 4 sub kegiatan;
- 12) Penanaman Modal, dilaksanakan dalam 4 program, 4 kegiatan, dan 7 sub kegiatan;
- 13) Kepemudaan dan Olah raga, dilaksanakan dalam 3 program, 7 kegiatan, dan 8 sub kegiatan;
- 14) Statistik, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 3 sub kegiatan;
- 15) Persandian, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan;
- 16) Kebudayaan, dilaksanakan dalam 6 program, 7 kegiatan, dan 15 sub kegiatan;
- 17) Perpustakaan, dilaksanakan dalam 1 program, 1 kegiatan, dan 7 sub kegiatan;
- 18) Kearsipan, dilaksanakan dalam 2 program, 4 kegiatan, dan 5 sub kegiatan.

c. Pelaksanaan Urusan Pilihan

- 1) Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan dalam 3 program, 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan;
- 2) Pariwisata, dilaksanakan dalam 3 program, 3 kegiatan, dan 8 sub kegiatan;
- 3) Pertanian, dilaksanakan dalam 5 program, 9 kegiatan, dan 17 sub kegiatan;

- 4) Perdagangan, dilaksanakan dalam 5 program, 7 kegiatan, dan 8 sub kegiatan;
- 5) Perindustrian, dilaksanakan dalam 2 program, 2 kegiatan, dan 6 sub kegiatan.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara terinci sebagaimana dalam tabel 3.1, 3.2 dan 3.3 sebagai berikut:

### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		<b>1. Program Pengelolaan Pendidikan</b>					
				Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,50 Tahun	7,25 Tahun			
				Angka Harapan Lama Sekolah	12,35 Tahun	12,32 Tahun			
				a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	87,56%			
				1) Penambahan Ruang Kelas Baru	18 Lokasi	18 Lokasi			
				2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2 Sekolah	1 Sekolah	Keterbatasan anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya	
				3) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5 Sekolah	8 Sekolah			
				4) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	10 Sekolah	8 Sekolah	Keterbatasan anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9 Sekolah	2 Sekolah	Keterbatasan anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya	
				6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	16 Lokasi	16 Sekolah			
				7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3 Sekolah	3 Sekolah			
				8) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah			
				9) Pengadaan Mebel Sekolah	50 Sekolah	27 Sekolah	Keterbatasan anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya	
				10) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.500 Siswa	1500 Siswa			
				11) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	64 Paket	64 Paket			
				12) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.000 Siswa	9.933 Siswa	Perhitungan awal termasuk siswa Madrasah, dikarenakan tidak ada Ujian Nasional sehingga yang dihitung sebagai realisasi hanya peserta Ujian Sekolah saja		

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				13) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.940 Orang	2927 Orang	GTT Sekolah Swasta ada yg sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG)	Validasi data usulan	
				14) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.193 Orang	2.193 Orang			
				15) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	434 Sekolah	434 Sekolah			
				16) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	409 Sekolah	409 Sekolah			
				17) Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	19 Sekolah	19 Sekolah			
				b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<b>100%</b>	<b>81,88%</b>			
				1) Penambahan Ruang Kelas Baru	14 Sekolah	14 Sekolah			
				2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1 Ruang	1 Ruang			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4 Paket	1 Paket	Penyesuaian nomen katur sub kegiatan sesuai Permendagri	3 Paket dialihkan ke Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	76 Sekolah	17 Sekolah	Keetersediaan Dana	Di usulkan di tahun 2022	
				5) Pengadaan Mebel Sekolah	1.730 Set	1386 Set	Ketersediaan Dana	Di usulkan di tahun 2022	
				6) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	78 Sekolah	78 Sekolah			
				7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8 Sekolah	8 Sekolah			
				8) Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	10.950 Siswa	8.015 Siswa	Perhitungan awal termasuk siswa Madrasah, dikarenakan tidak ada Ujian Nasional sehingga yang dihitung sebagai realisasi hanya peserta Ujian Sekolah saja		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.072 Orang	1.072 Orang			
				10) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	890 Orang	890 Orang			
				11) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	42 Sekolah	42 Sekolah			
				c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<b>100%</b>	<b>92,71%</b>			
				1) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	28 Sekolah	26 Sekolah	Keterbatasan anggaran	Diusulkan pada tahun anggaran berikutnya	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2 Sekolah	1 sekolah	1 lembaga TK Masyitoh Mandisari Parakan tidak di cairkan karena terdapat perbedaan antara rekening belanja dan rencana penggunaan	Telah diupayakan untuk dilakukan revisi pada perubahan, akan tetapi waktu pelaksanaan tidak memungkinkan.	
				3) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Sekolah	2 sekolah			
				4) Pengadaan Mebel PAUD	1 Sekolah	3 sekolah			
				5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1 Sekolah	1 sekolah			
				6) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	626 Sekolah	626 Sekolah			
				7) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.081 Orang	989 Orang	Sebagian PTK pindah/keluar		
				8) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	152 Orang	152 orang			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				9) Pengelolaan Dana BOP PAUD	626 Lembaga	626 Lembaga			
				d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	<b>100%</b>	<b>81,05%</b>			
				1) Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	5 Kegiatan	5 Kegiatan			
				2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.776 Orang	4650 Orang	Ketersediaan anggaran dan banyak Guru Keagamaan yang telah menerima honor sejenis dari Provinsi	Mengoptimalkan pendataan calon penerima	
				3) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	24 Lembaga	24 Lembaga			
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>		<b>1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>					
				<b>Angka Kematian Ibu</b>	<b>75,5 per 100.000 KH</b>	<b>174,38 per 100.000 KH</b>			
				<b>Angka Kematian Bayi</b>	<b>12,4 per 1.000 KH</b>	<b>12,72 Per 1.000 KH</b>			
				<b>Prevalensi balita gizi buruk</b>	<b>0,5 %</b>	<b>0,18%</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	81,84 %	90,28%			
				Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	90 %	100%			
				Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,4 %	97,73%			
				Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar	100 %	100%			
				Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	100%			
				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,6 %	100%			
				Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	100 %	100%			
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	68 %	100%			
				Angka Kematian Neonatal (AKN)	7 per 1.000 KH	9,54 Per 1.000 KH			
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	81,64%			
				Angka Kematian Balita	13,8 per 1.000 KH	14,05 Per 1.000 KH			
				Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	84,92%			
				Cakupan warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	69,25%			
				Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	89,52%			
				Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %	30,97%			
				Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 %	92,50%			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	102,63%			
				Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	67,88%			
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	73,49%			
				Indikator program Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	50,00%	56,99%			
				Indikator program Cakupan nilai akreditasi RSUD	100%	100%			
				a. Kegiatan Penyediaa fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan pembangunan puskesmas	2 paket pembangunan puskesmas Bulu dan Jumo	2 paket pembangunan puskesmas Bulu dan Jumo			
				2) Sub kegiatan pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	1 paket pembangunan Labkesda	1 paket pembangunan Labkesda			
				3) Sub kegiatan Pengembangan puskesmas	1 paket penambahan ruang Puskesmas Temanggung	1 paket penambahan ruang Puskesmas Temanggung			
				4) Sub kegiatan Pengembangan fasilitas Kesehatan lainnya	Penunjang DAK 1 kegiatan, DED rehab/penambahan ruang fasilitas pelayanan kesehatan 15 paket	Penunjang DAK 1 kegiatan, DED rehab/penambahan ruang fasilitas pelayanan kesehatan 15 paket			
				5) Sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2 unit ambulans, 1 unit mobil promkes, 10 paket sanitarian kit, 21 unit cold storage, 1 paket IPAL Labkesda, 60 paket antropometri	2 unit ambulans, 1 unit mobil promkes, 10 paket sanitarian kit, 21 unit cold storage, 1 paket IPAL Labkesda, 60 paket antropometri			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub kegiatan pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	2 paket alat Kesehatan (Labkesda dan puskesmas)	2 paket alat Kesehatan (Labkesda dan puskesmas)			
					Tersedianya peralatan kesehatan dan sarana penunjang RS lainnya sebanyak 3 paket	Tersedianya peralatan kesehatan dan sarana penunjang RS lainnya sebanyak 3 paket			
				7) Sub kegiatan Operasional pelayanan Rumah Sakit	12 bulan	12 bulan			
				8) Sub kegiatan pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	1 paket	1 paket			
				9) Sub kegiatan pengadaan obat, vaksin	42 paket obat	42 paket obat			
				10) Sub kegiatan pengadaan Bahan Habis Pakai	4 paket (BMHP, Cartridge TCM, R0 dan BHP skrining HIV dan BHP Malaria)	4 paket (BMHP, Cartridge TCM, R0 dan BHP skrining HIV dan BHP Malaria)			
				11) Sub kegiatan distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin,	12 bulan pendistribusian obat dan BMHP	12 bulan pendistribusian obat dan BMHP			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				BMHP, makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas Kesehatan lainnya	ke 26 puskesmas	ke 26 puskesmas			
				b. Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	<b>100%</b>	99,24%			
			Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan  Keputusan Bupati Temanggung nomor 130/168 Tahun 2021	1) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Pertemuan pengkajian AMP Maternal 1x, AMP Neonatal 1x, rekomendasi AMP 1x, Rakor pengelola program (PWS KIA?KB) 2x, dan cetak checklist ANC terpadu	Pertemuan pengkajian AMP Maternal 1x, AMP Neonatal 1x, rekomendasi AMP 1x, Rakor pengelola program (PWS KIA?KB) 2x, dan cetak checklist ANC terpadu			
				2) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	12 bulan klaim pelayanan jaminan persalinan bagi ibu hamil dan bersalin miskin	12 bulan klaim pelayanan jaminan persalinan bagi ibu hamil dan bersalin miskin			
				3) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	MTBS 2x, cetak buku kegiatan MTBS 53 bk, roll up banner kesehatan ibu	MTBS 2x, cetak buku kegiatan TBS 53 bk, roll up banner kesehatan ibu			



N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			tentang Tim penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Temanggung		27 bh, buku saku petugas 80 bk, supervise/monev kesehatan Bayi Baru Lahir ke 26 puskesmas	27 bh, buku saku petugas 80 bk, supervise/monev kesehatan Bayi Baru Lahir ke 26 Puskesmas			
				4) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orientasi pelayanan bayi dan anak dengan MTBS 1x, Rakor monitoring program penunjang SPM kes anak 1x, dan monev pengelola program remaja 1x, rakor peningkatan pelayanan Kesehatan reproduksi remaja 1x	Orientasi pelayanan bayi dan anak dengan MTBS 1x, Rakor monitoring program penunjang SPM kes anak 1x, dan monev pengelola program remaja 1x, rakor peningkatan pelayanan Kesehatan reproduksi remaja 1x			
				5) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rakor UKS LS 1x, Rakor UKS tentang pengelola program 2x, supervisi ke 26 Puskesmas	Rakor UKS LS 1x, Rakor UKS tentang pengelola program 2x, supervisi ke 26 Puskesmas			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sosialisasi kes usia produktif dan PISPK 2x, Pertemuan pengelola program kes usia produktif 2x, evaluasi program Kesehatan usia produktif 2x, supervise ke 26 puskesmas.	Sosialisasi kes usia produktif dan PISPK 2x, Pertemuan pengelola program kes usia produktif 2x, evaluasi program Kesehatan usia produktif 2x, supervise ke 26 puskesmas.			
				7) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rakor LP/LS organsasi profesi terkait kes lanjut usia 3x, orientasi pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status Kesehatan lansia 2x, Monev program lansia 1x	Rakor LP/LS organsasi profesi terkait kes lanjut usia 3x, orientasi pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status Kesehatan lansia 2x, Monev program lansia 1x			
				8) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Pemantapan tatalaksana Hipertensi dan DM bagi dokter dan pengelola program puskesmas 2x, rakor program P2PM bagi	Pemantapan tatalaksana Hipertensi dan DM bagi dokter dan pengelola program puskesmas 2x, rakor program P2PM bagi			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kepala Puskesmas 1x, validasi data program hipertensi dan DM 1x, supervise ke puskesmas 10x, pengambilan logistic ke Dinkesprov 1x	kepala Puskesmas 1x, validasi data program hipertensi dan DM 1x, supervise ke puskesmas 10x, pengambilan logistic ke Dinkesprov 1x			
				9) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	OJT surveilans data DM 1x, rakor petugas puskesmas 1x, sosialisasi mengenali gejala DM, pencegahan dan penanganannya di OPD 1x, Supervisi ke puskesmas 4x, pengadaan stik gula darah 12 box	OJT surveilans data DM 1x, rakor petugas puskesmas 1x, sosialisasi mengenali gejala DM, pencegahan dan penanganannya di OPD 1x, Supervisi ke puskesmas 4x, pengadaan stik gula darah 12 box			
				10) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	Pemantapan TPKJM tingkat Kabupaten 1x, Pemantapan surveilans kesehatan jiwa bagi dokter dan petugas puskesmas 2x,	Pemantapan TPKJM tingkat Kabupaten 1x, Pemantapan surveilans kesehatan jiwa bagi dokter dan petugas puskesmas 2x,			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Rakor petugas puskesmas 1x, supervise ke puskesmas 4x dan rujukan kasus ODGJ berat ke RS jiwa Magelang 1x	Rakor petugas puskesmas 1x, supervise ke puskesmas 4x dan rujukan kasus ODGJ berat ke RS jiwa Magelang 1x			
				11) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Rakor investigasi kontak bagi petugas dan kader 2x, Validasi data capaian P2TBC 4x, Monev investigasi kontak 2x, Pengiriman sampel dahak uji silang ke Balkesmas Ambarawa 4x, Supervisi ke 8 puskesmas, dan pengambilan logistik P2TBC 4x	Rakor investigasi kontak bagi petugas dan kader 2x, Validasi data capaian P2TBC 4x, Monev investigasi kontak 2x, Pengiriman sampel dahak uji silang ke Balkesmas Ambarawa 4x, Supervisi ke 8 puskesmas, dan pengambilan logistik P2TBC 4x			
				12) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Operasional Komisi penanggulangan AID'S Kabupaten Temanggung selama 12 bulan	Operasional Komisi penanggulangan AID'S Kabupaten Temanggung selama 12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				13) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Belanja APD (Gown 1500 pcs, Hands scoon non sterill 650 boks, masker 3 play 535 box), Kebutuhan pemulasaran jenazah kasus pandemic Covid-19 (Handscoon non sterill S 41 boks, hasmat medis 1800 pcs, kain kafan 180 set, peti jenazah 180 bh, plastic kafan 2160 meter, tali tambang 3600 meter), Set anafilaktik pelaksanaan vaksinasi Covid-19 (Alat suntik 1 ml 380 bh, infus set 380 set, IV chateter 1140 set, plester 64 roll), kegiatan vaksinasi Covid-19 (Alkohol swab 8350 box, hand sanitizer 3872 botol, handscoon non sterill 3109 box, masker plus 3 play 135 box,	Belanja APD (Gown 1500 pcs, hands scoon non sterill 650 boks, masker 3 play 535 box), Kebutuhan pemulasaran jenazah kasus pandemic Covid-19 (Handscoon non sterill S 41 boks, hasmat medis 1220 pcs, kain kafan 0, peti jenazah 44 bh, plastic kafan 50 meter, tali tambang 670 meter), Set anafilatik pelaksanaan vaksinasi covid-19 (Alat suntik 1 ml 380 bh, infus set 380 set, IV chateter 1140, plester 64 roll), kegiatan vaksinasi Covid-19 (Alkohol swab 8350 box, handsanitizer 3872 botol, hand scoon non sterill 3109 box, masker plus 3 play 135 box,	Pengadaan perbekalan kesehatan/bahan habis pakai penanganan COVID-19 disesuaikan dengan kebutuhan		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>sabun cuci tangan 1525 botol, surface Disinfectal 500 ml 3069 botol), Set anafilaktik pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tas kemasan 64 Buah, Media KIE kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 2000 lbr, ATK untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 di 33 faskes, Penggandaan form vaksinasi covid-19 di 33 faskes, set anafilaktik pelaksanaan vaksinasi Covid-19 (Epinefrin injeksi 1 mg/ml 190 ampul, natrium clorida Nacl 380 botol), Belanja obat-obatan lainnya (hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan</p>	<p>sabun cuci tangan 1525 botol, surface Disinfectal 500 ml 3069 botol), Set anafilaktik pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tas kemasan 64 buah, Media KIE kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 2000 lbr, ATK untuk kegiatan vaksinasi Covid-19 di 33 faskes, penggandaan form vaksinasi covid-19 di 33 faskes, set anafilaktik pelaksanaan vaksinasi Covid-19 (Epinefrin injeksi 1 mg/ml 190 ampul, natrium clorida Nacl 380 botol), belanja obat-obatan lainnya (hand sanitizer untuk pelacakan kontak, pengambilan dan pemeriksaan</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					specimen bagi petugas puskesmas dan tracer kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 2900 botol), makan minum pengendalian covid-19 dan vaksinasi di 33 Faskes, insentif relawan pemulasaran jenazah kasus pandemic covid-19 12 bulan, insentif tenaga non kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemic covid-19 12 bulan, media KIE kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19/jasa publikasi/pengumuman media Elektronik 2 bulan, perjalanan dinas luar kota pengiriman	specimen bagi petugas puskesmas dan tracer kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 2030 botol), makan minum pengendalian covid-19 dan vaksinasi di 33 faskes, insentif relawan pemulasaran jenazah kasus pandemic covid-19 11 bulan, insentif tenaga non kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemic covid-19 12 bulan, media KIE kegiatan BOK untuk upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19/jasa publikasi/pengumuman media elektronik 2 bulan, perjalanan dinas luar kota pengiriman			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					sample Covid-19 12 bulan, pengelolaan limbah medis vaksinasi Covid-19 12 bulan.	sample Covid-19 12 bulan, pengelolaan limbah medis vaksinasi Covid-19 11 bulan.			
				14) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Makmin Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 12 bulan, jasa tenaga Kesehatan (vaksinator) 527 petugas selama 12 bulan, jasa tenaga pengolah data COVID-19 sebanyak 7 org selama 4 bulan, swab testing 5x, pengadaan Hazmat 7.333 buah, antigen 1.000 buah, Pengamanan vaksin oleh TNI & POLRI selama 108 hari, Pemantauan pelaksanaan vaksinasi 16x, dan pengambilan vaksin 27x	Makmin Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 12 bulan, jasa tenaga Kesehatan (vaksinator) 527 petugas selama 12 bulan, jasa tenaga pengolah data COVID-19 sebanyak 7 org selama 4 bulan, swab testing 5x, pengadaan Hazmat 7.333 buah, antigen 1.000 buah, Pengamanan vaksin oleh TNI & POLRI selama 108 hari, Pemantauan pelaksanaan vaksinasi 16x, dan pengambilan vaksin 27x			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				15) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Pelatihan kader pembangunan manusia 1x sebanyak 40 kader, Rembuk stunting di 10 desa lokus, orientasi motivator ASI di 10 lokasi, orientasi stunting anak sekolah di SMP, SMA/SMK 7 angkatan, Orientasi PMBA untuk kader 2 angkatan, Rakor pelayanan gizi di puskesmas 2x, Rakor Gizi tingkat Kabupaten 1x, seminar stunting 1x, Reviu e-PPGBM 1x, Reviu antropometri 1x, Pengadaan PMT Ibu hamil KEK 1 paket, pengadaan media promosi Gizi masyarakat (booklet, leaflet, Lembar balik, poster dan roll bnner), Monev program gizi di 26 puskesmas	Pelatihan kader pembangunan manusia 1x sebanyak 40 kader, Rembuk stunting di 10 desa lokus, orientasi motivator ASI di 10 lokasi, orientasi stunting anak sekolah di SMP, SMA/SMK 7 angkatan, Orientasi PMBA untuk kader 2 angkatan, Rakor pelayanan gizi di puskesmas 2x, Rakor Gizi tingkat Kabupaten 1x, seminar stunting 1x, Reviu e-PPGBM 1x, Reviuantropometri 1x, Pengadaan PMT Ibu hamil KEK 1 paket, pengadaan media promosi Gizi masyarakat (booklet, leaflet, Lembar balik, poster dan roll bnner), Monev program gizi di 26 puskesmas			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				16) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Sosialisasi hygiene dan sanitasi bagi pengelola TPM dan DAMIU (80 peserta), Sosialisasi SIPGAR (Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran) bagi pengelola Kesehatan kerja dan OR puskesmas, Sosialisasi Pos UKK untuk petugas puskesmas, Ceatak roll banner aktifitas fisik sebanyak 30 buah	Sosialisasi hygiene dan sanitasi bagi pengelola TPM dan DAMIU (80 peserta), Sosialisasi SIPGAR (Sistem Informasi Pengukuran Kebugaran) bagi pengelola Kesehatan kerja dan OR puskesmas, Sosialisasi Pos UKK untuk petugas puskesmas, Ceatak roll banner aktifitas fisik sebanyak 30 buah			
				17) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Pelatihan pengelolaan TPM bagi masyarakat (jasa boga, DAMIU 300 orang), RakorLintas sector persiapan Kabupaten Sehat 1x, Sosialisasi GP2SP untuk petugas puskesmas 1x, Sosialisasi hygiene dan	Pelatihan pengelolaan TPM bagi masyarakat (jasa boga, DAMIU 300 orang), RakorLintas sector persiapan Kabupaten Sehat 1x, Sosialisasi GP2SP untuk petugas puskesmas 1x, Sosialisasi hygiene dan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					sanitasi bagi Pondok pesantren 2x, Pengadaan media promosi penyehatan lingkungan (STBM, Hidup sehat, tatanan Kabupaten Sehat, konseling sanitasi dan Pos UKK) berupa roll banner, lembar balik 120 buah	sanitasi bagi Pondok pesantren 2x, Pengadaan media promosi penyehatan lingkungan (STBM, Hidup sehat, tatanan Kabupaten Sehat, konseling sanitasi dan Pos UKK) berupa roll banner, lembar balik 120 buah			
				18) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Advokasi mendorong kebijakan Germas untuk anak sekolah 5x 35 orang, advokasi pembinaan pengembangan UKBM poskestren dalam rangka pembudayaan GERMAS 3x 30 orang, Advokasi pengembangan UKBM posyandu dalam rangka penurunan stunting 2x 30 orang, advokasi penguatan krida husada pramuka	Advokasi mendorong kebijakan Germas untuk anak sekolah 5x 35 orang, advokasi pembinaan pengembangan UKBM poskestren dalam rangka pembudayaan Germas 3x 30 orang, advokasi pengembangan UKBM posyandu dalam rangka penurunan stunting 2x 30 orang, advokasi penguatan krida husada pramuka			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					<p>bagi instruktur SBH dalam rangka Germas 2x 35 orang, koordinasi LP/LS organisasi profesi terkait kesehatan lanjut usia dalam rangka peningkatan Germas 1x 35 orang, pemberdayaan masyarakat bagi kader kesehatan 5x 28 orang, penggerakan masyarakat dalam rangka implementasi Germas kegiatan saka bhakti husada 10x 25 orang, penguatan advokasi pembudayaan Germas tingkat kecamatan 20x 35 orang, pertemuan forkom Germas tingkat kabupaten dalam rangka advokasi penguatan Germas di kabupaten 2x 30 orang, pertemuan</p>	<p>bagi instruktur SBH dalam rangka Germas 2x 35 orang, koordinasi LP/LS organisasi profesi terkait kesehatan lanjut usia dalam rangka peningkatan Germas 1x 35 orang, pemberdayaan masyarakat bagi kader kesehatan 5x 28 orang, penggerakan masyarakat dalam rangka implementasi Germas kegiatan saka bhakti husada 10x 25 orang, penguatan advokasi pembudayaan Germas tingkat kecamatan 20x 35 orang, pertemuan forkom Germas tingkat kabupaten dalam rangka Advokasi penguatan Germas di kabupaten 2x 30 orang, pertemuan</p>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					koordinasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka advokasi Germas bagi pedagang pasar 3x 30 orang, pertemuan koordinasi peningkatan PJJAS bagi petugas puskesmas dalam rangka Germas 2x 35 orang, pertemuan pembinaan penyehat tradisional (HATRA) dalam rangka peningkatan pembudayaan Germas 2x 35 orang, makan minum rapat kegiatan promosi kesehatan 4x 30 orang, penyediaan media KIE kesehatan 1x 1 paket	koordinasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka advokasi Germas bagi pedagang pasar 3x 30 orang, pertemuan koordinasi peningkatan PJJAS bagi petugas puskesmas dalam rangka Germas 2x 35 orang, pertemuan pembinaan penyehat tradisional (HATRA) dalam rangka peningkatan pembudayaan Germas 2x 35 orang, makan minum rapat kegiatan promosi kesehatan 4x 30 orang, penyediaan media KIE kesehatan 1x 1 paket			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				19) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya	Rakor petugas pengelola Kesehatan tradisional 2x, Kunjungan ke Griya Sehat Wonosobo, monev asman tanaman obat keluarga ke 26 puskesmas	Rakor petugas pengelola Kesehatan tradisional 2x, Kunjungan ke Griya Sehat Wonosobo, monev asman tanaman obat keluarga ke 26 puskesmas			
				20) Sub kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	Rakor Surveilans bagi petugas puskesmas 1x, Sosialisasi aplikasi Corona Jateng 1x, aplikasi all record 1x, Validasi data surveilan 1x, pengiriman sampel KLB 2x, pengiriman sampel kasus CVID-19 58x, Supervisi, Penyelidikan Epidemiologi, tracing penyakit potensial KLB 23x, dan pengambilan lgistik program 5x	Rakor Surveilans bagi petugas puskesmas 1x, Sosialisasi aplikasi Corona Jateng 1x, aplikasi all record 1x, Validasi data surveilan 1x, pengiriman sampel KLB 2x, pengiriman sampel kasus CVID-19 58x, Supervisi, Penyelidikan Epidemiologi, tracing penyakit potensial KLB 23x, dan pengambilan lgistik program 5x			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				21) Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	Operasional pelaksanaan pelayanan Rumatan Metadon di Puskesmas Parakan selama 1 tahun	Operasional pelaksanaan pelayanan Rumatan Metadon di Puskesmas Parakan selama 1 tahun			
				22) Sub kegiatan pengelolaan upaya pelayanan kesehatan khusus	Operasional pelayanan kegawatdaruratan bidang Kesehatan selama 1 tahun	Operasional pelayanan kegawatdaruratan bidang Kesehatan selama 1 tahun			
				23) Sub kegiatan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	6 Buku kepesertaan JKN Kabupaten temanggung, Rakor kegiatan risiko krisis kesehatan dan pasca kesehatan 3x, MOU dg RS 1x, pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Temanggung untuk 1.168 kasus IVA Cryo dan 22 penjaminan (KIPI, KLB, & PGOT)	6 Buku kepesertaan JKN Kabupaten temanggung, Rakor kegiatan risiko krisis kesehatan dan pasca kesehatan 3x, MOU dg RS 1x, pembiayaan kesehatan bagi masyarakat Temanggung untuk 1.168 kasus IVA Cryo dan 22 penjaminan (KIPI, KLB, & PGOT)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				24) Sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	cetak form IVA 4500 lbr, KM resiko PTM 5000 lbr, Buku IVA 2500 bk, buku pedoman indra 30, Stik : Reg TB MDR 15, Deteksi dini HPB 100, Form KDRS DBD 15 bk, form screening HIV 100 bk, Form TB 6 jenis 1110 bk, deteksi dini jiwa bagi kader 1000 lbr, supervisi dan validasi PTM 38x di 26 puskesmas, Stik Asam urat 21 box , Gula darah 15 box, Cholestrol 38 box, TG 13 box, paket untuk pengambilan spesiemen 1 paket (Apron, bok slide, hand scoon, kaca mata google, masker, kantong plastic). Supervisi, fastek, validasi data 34x, penjangkauan keluarga risti HIV AIDS LSL dan pop berisiko 3x,	Cetak Form IVA 4500 lbr, KM resiko PTM 5000 lbr, Buku IVA 2500 bk, buku pedoman indera 30, Stik : Reg TB MDR 15, Deteksi Dini HPB 100, form KDRS DBD 15 bk, form screening HIV 100 bk, form TB 6 jenis 1110 bk, deteksi dini jiwa bagi kader 1000 lbr, supervise dan validasi PTM 38x di 26 puskesmas, Stik Asam urat 21 box, Gula darah 15 box, Cholestrol 38 box, TG 13 box, paket untuk pengambilan spesiemen 1 paket (Apron, bok slide, hand scoon, kaca mata google, masker, kantong plastic). Supervise, fastek, validasi data 34x, penjangkauan keluarga risti HIV AIDS LSL dan			



N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Skreening HIV AIDS 4x di lapas, monev terhadap PDP HIV AIDS 2x, validasi data penyakit menular 6x, sosialisasi pencatatan dan pelaporan (DBD diare) 3x, evaluasi program 4x, sosialisasi bagi masyarakat tentang DBD 6x, rakor TBC dan PTM 3x, Pelatihan petugas laboratorium dan dokter 2x, pengiriman spesiemen viral load HIV ke RS Kariadi 3x.	pop berisiko 3x, screening HIV AIDS 4x di lapas, monev terhadap PDP HIV AIDS 2x, validasi data penyakit menular 6x, sosialisasi pencatatan dan pelaporan (DBD diare) 3x, evaluasi program 4x, sosialisasi bagi masyarakat tentang DBD 6x, rakor TBC dan PTM 3x, pelatihan petugas laboratorium dan dokter 2x, pengiriman spesiemen viral load HIV ke RS kariadi 3x.			
				25) Sub kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Pembayaran iuran JKN bagi 38.981 jiwa masyarakat miskin selama 12 bulan	Pembayaran iuran JKN bagi 38.981 jiwa masyarakat miskin selama 12 bulan			
				26) Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah selama 12 bulan	Operasional pelayanan Laboratorium Kesehatan daerah selama 12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				27) Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota	Workshop 3X (Pemahaman standar akreditasi puskesmas, Tata Kelola mutu puskesmas, dan Monev mutu Puskesmas), rapat persiapan pelaksanaan PPMI 2x, pendampingan dalam rangka PPMI di 6 puskesmas dan PPME (Survey Penilaian akreditasi puskesmas)	Workshop 3X (Pemahaman standar akreditasi puskesmas, Tata Kelola mutu puskesmas, dan Monev mutu Puskesmas), rapat persiapan pelaksanaan PPMI 2x, pendampingan dalam rangka PPMI di 6 puskesmas dan	Kegiatan PPME (Survey Penilaian akreditasi puskesmas) tidak dapat dilaksanakan dengan adanya SE Menkes No. HK.02.01/MENKES /455/2020 tentang Perizinan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Pelaksanaan survey dilaksanakan setelah masa pandemic dicabut oleh pemerintah pusat	
				28) Sub kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	OJT petugas imunisasi puskesmas 1x, rakor pelaksanaan imunisasi di puskesmas 4x, pemantauan pelaksanaan imunisasi di 20 puskesmas, pengambilan vaksin dan logistic ke Dinkesprov 12x	OJT petugas imunisasi puskesmas 1x, rakor pelaksanaan imunisasi di puskesmas 4x, pemantauan pelaksanaan imunisasi di 20 puskesmas, pengambilan vaksin dan logistic ke Dinkesprov 12x			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>					
				<b>Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi</b>	<b>90 %</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	<b>100%</b>	100%			
				1) Sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan sesuai standar	12 bulan klaim insentif tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19	12 bulan klaim insentif tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19			
				2) Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan	11 rumpun jabatan fungsional dibina dan dilakukan penilaian angka kreditnya	11 rumpun jabatan fungsional dibina dan dilakukan penilaian angka kreditnya			
				<b>3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</b>					

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi</b>	<b>62 %</b>	<b>19,23%</b>			
				<b>Cakupan penggunaan obat rasional di puskesmas</b>	<b>77 %</b>	<b>81%</b>			
				<b>Pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan pemberian ijin apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	100%	100%			
				1) Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian 85, peningkatan kompetensi petugas pengawas 30, pengawasan Apotek, toko obat, dan Umot terhadap pemenuhan standart persyaratan 57,	Bimtek kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian 90, peningkatan kompetensi petugas pengawasan 30, pengawasan apotek, toko obat dan umot terhadap pemenuhan standart persyaratan 58,			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pengawasan apotek dan toko obat dalam rangka rekomendasi perijinan 5	pengawasan apotek dan toko obat dalam rangka rekomendasi perijinan 10.			
				b. Kegiatan penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produksi makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	100%	91,86%			
				1) Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan	Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industry rumah tangga pangan 120 PIRT, pengawasan dalam rangka penerbitan SPP IRT 120, Pengkajian ulang sertifikat produksi 3, Inventarisasi sarana IRTP 3,	Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha industry rumah tangga pangan 113 PIRT, Pengawasan dalam rangka penerbitan SPP IRT 106, Pengkajian ulang sertifikat produksi 1, Inventarisasi sarana IRTP 1,	Pelatihan PKP ada yang tidak datang, pemilik sarana tidak mau di periksa, karena pandemi tidak dilakukan kunjungan ke lokasi IRTP	Menghubungi IRTP melalui surat dan telp, melakukan koordinasi dan pembinaan ke IRTP	

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industry rumah tangga	Pengawasan sarana IRTP 270, Sampling dan pengkajian pangan IRT 25, Monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan secara IRTP 3, KIE 306, pengawasan ke pasar daerah 10 lokasi	Pengawasan secara IRTP 229, Sampling dan pengkajian pangan IRT 26, Monitoring dan tindak lanjut hasil pengawasan sarana IRTP 1, KIE 287, Pengawasan ke pasar daerah 8 lokasi			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<b>1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>					
				<b>Persentase jaringan irigasi kondisi baik</b>	<b>58,32%</b>	<b>58,1%</b>			
				<b>Cakupan area layanan daerah irigasi</b>	<b>96,80%</b>	<b>95,29%</b>			
				a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	6 UPTD yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I	6 UPTD yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Temanggung, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak	Temanggung, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak			
				2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan pembinaan dan pemberdayaan GP3A Progo Pistan	1 kegiatan pembinaan dan pemberdayaan GP3A Progo Pistan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kegiatan Rapat Komisi Irigasi Kabupaten Temanggung	1 kegiatan Rapat Komisi Irigasi Kabupaten Temanggung			
				b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 dokumen perencanaan irigasi dan 1 dokumen perencanaan bendung	1 dokumen perencanaan irigasi dan 1 dokumen perencanaan bendung			
				2) Sub kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	10 paket yaitu rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Siences, D.I. Aji Bulu, D.I. Siwesi, D.I. Aji Bandunggede,	10 paket yaitu rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Siences, D.I. Aji Bulu, D.I. Siwesi, D.I. Aji Bandunggede,			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					D.I. Sicangkring/sejati , D.I. Gondangan, D.I. Aji Watubuan, D.I. Bangkong Mangunsari, D.I. Sidengok , 2 paket konsultan pengawas yaitu konsultan pengawasan pekerjaan pengawasan wilayah Ngadirejo, Temanggung dan Tembarak, konsultan pengawasan pekerjaan wilayah parakan dan kandangan	D.I. Sicangkring/sejati , D.I. Gondangan, D.I. Aji Watubuan, D.I. Bangkong Mangunsari, D.I. Sidengok , 2 paket konsultan pengawas yaitu konsultan pengawasan pekerjaan pengawasan wilayah Ngadirejo, Temanggung dan Tembarak, konsultan pengawasan pekerjaan wilayah parakan dan kandangan			
				3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	6 UPTD yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan	6 UPTD yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengairan Regional III Ngadirejo, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak				
				<b>2. Program Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>	100%	100%			
				<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum</b>	88%	94,52%			
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Terlaksananya kegiatan DAK di 10 lokasi yaitu Desa Bejen Kecamatan Bejen, Desa Campurejo Kecamatan Tretep, Desa Campursari Kecamatan Ngadirejo, Desa Danupayan Kecamatan Bulu, Desa Gondosuli Kecamatan Bulu, Desa Jeketro Kecamatan Kledung, Desa Mondoretno Kecamatan Bulu, Desa Muncar Kecamatan Gemawang dan 1 Paket Konsultan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan DAK di 10 lokasi yaitu Desa Bejen Kecamatan Bejen, Desa Campurejo Kecamatan Tretep, Desa Campursari Kecamatan Ngadirejo, Desa Danupayan Kecamatan Bulu, Desa Gondosuli Kecamatan Bulu, Desa Jeketro Kecamatan Kledung, Desa Mondoretno Kecamatan Bulu, Desa Muncar Kecamatan Gemawang dan 1 Paket Konsultan Pengawasan	-	-	-
				2) Sub kegiatan Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM	Terlaksananya Fasilitas kegiatan DAK untuk 10 lokasi , Tenaga Fasilitas Lapangan untuk perencanaan DAK TA.2022	Terlaksananya Fasilitas kegiatan DAK untuk 10 lokasi , Tenaga Fasilitas Lapangan untuk perencanaan DAK TA.2022	-	-	-

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase</b>					
				<b>Persentase pelayanan drainase skala kawasan/ kota sehingga tidak terjadi genangan</b>	<b>48%</b>	<b>22,54%</b>			
				a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	1 kegiatan fasilitasi bantuan keuangan ke desa-desa (bankeudes)	1 kegiatan fasilitasi bantuan keuangan ke desa-desa (bankeudes)			
				2) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	6 UPTD yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan, UPTD	6 UPTD yaitu UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I Temanggung, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional II Parakan, UPTD			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak	Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional III Ngadirejo, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional IV Kranggan, UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional V Kandangan dan UPTD Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional VI Tembarak			
				<b>4. Program Pengembangan Permukiman</b>					
				<b>Persentase Gedung pemerintah kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>86,82%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG</p>	<p>Terlaksananya Hibah PAMSIMAS 5 Lokasi yaitu Hibah Pamsimas Reguler Desa Tegowanuh Kec. Kaloran, HID Pamsimas Desa Kembangsari Kec. Kandangan, Hibah Pamsimas Reguler Desa Bojong Kec. Tretep, Hibah Pamsimas Reguler Desa Gedongsari Kec. Jumo, Hibah Pamsimas Reguler Desa Nampirejo Kec. Temanggung, Rehab Gedung PWRI 1 Lokasi, dan Pembangunan Gedung NU 1 Lokasi.</p>	<p>Terlaksananya Hibah PAMSIMAS 5 Lokasi yaitu Hibah Pamsimas Reguler Desa Tegowanuh Kec. Kaloran, HID Pamsimas Desa Kembangsari Kec. Kandangan, Hibah Pamsimas Reguler Desa Bojong Kec. Tretep, Hibah Pamsimas Reguler Desa Gedongsari Kec. Jumo, Hibah Pamsimas Reguler Desa Nampirejo Kec. Temanggung, Rehab Gedung PWRI 1 Lokasi, dan Pembangunan Gedung NU 1 Lokasi.</p>			
				<p>2) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi,</p>	<p>1 Kegiatan pendampingan bankeudes dan kotaku</p>	<p>1 Kegiatan pendampingan bankeudes dan kotaku</p>	-	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ubahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota					
				<b>5. Program Penataan Bangunan Gedung</b>					
				<b>Persentase gedung pemerintah kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>86,82%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terlaksananya fasilitasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	Terlaksananya fasilitasi permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)	-	-	-

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya 3 Gedung yaitu Pembangunan Kantor Kejaksaan, Rehab Gedung Sarwo Guno dan Sarpras Jalan Rumah Dinas Kodim, Pembangunan Pagar Kantor Polres, 1 Konsultan Perencana dan 1 Konsultan Pengawas	Terbangunnya 3 Gedung yaitu Pembangunan Kantor Kejaksaan, Rehab Gedung Sarwo Guno dan Sarpras Jalan Rumah Dinas Kodim, Pembangunan Pagar Kantor Polres, 1 Konsultan Perencana dan 1 Konsultan Pengawas	-	-	-
				<b>6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</b>					
				<b>Persentase gedung pemerintah kondisi baik</b>	<b>75%</b>	<b>86,82%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Revitalisasi Lapangan, terlaksananya bantuan Material untuk	Terlaksananya Revitalisasi Lapangan, terlaksananya bantuan Material untuk	-	-	-



N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					masyarakat, 1 Konsultan Perencana dan 1 Konsultan Pengawas	masyarakat, 1 Konsultan Perencana dan 1 Konsultan Pengawas			
				2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya pemeliharaan Trotoar di 6 wilayah UPTD	Terlaksananya pemeliharaan Trotoar di 6 wilayah UPTD	-	-	-
				<b>7. Program Penyelenggaraan Jalan</b>					
				<b>Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan sedang)</b>	<b>84,65%</b>	<b>89,29%</b>			
				<b>Persentase jembatan kabupaten kondisi baik</b>	<b>93,13%</b>	<b>92,88%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya 4 paket pekerjaan yaitu Perencanaan Pembangunan Jalan (Bankeu), Perencanaan Peningkatan Jembatan, Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Pembangunan	Terlaksananya 4 paket pekerjaan yaitu Perencanaan Pembangunan Jalan (Bankeu), Perencanaan Peningkatan Jembatan, Perencanaan Peningkatan Kapasitas dan Pembangunan	-	-	-

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jalan Kabupaten (DAK) dan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat	Jalan Kabupaten (DAK) dan Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat			
				2) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya pelebaran jalan menuju standar di 6 ruas dan 1 konsultan pengawas yaitu Pelebaran Jalan Bengkal-Gambasan, Pelebaran Jalan Mungseng-Tiogomulyo, Pelebaran Jalan Pengilon-Wonosari dan Jalan Bulu-Wanutengah, Pelebaran Jalan Plimbungan-Bansari, Pelebaran Jalan Ruas Jalan Sengon Pandak Banaran, Pelebaran Jalan Sunggingsari-Glapansari dan Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan APBD	Terlaksananya pelebaran jalan menuju standar di 6 lokasi dan 1 konsultan pengawas yaitu Pelebaran Jalan Bengkal-Gambasan, Pelebaran Jalan Mungseng-Tiogomulyo, Pelebaran Jalan Pengilon-Wonosari dan Jalan Bulu-Wanutengah, Pelebaran Jalan Plimbungan-Bansari, Pelebaran Jalan Ruas Jalan Sengon Pandak Banaran, Pelebaran Jalan Sunggingsari-Glapansari dan Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan APBD	-	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Terlaksananya pelebaran jalan di 5 ruas, 1 konsultan perencana dan 3 konsultan pengawas yaitu Pelebaran Jalan Bantir-Wonobooyo (Bankeu), Pelebaran Jalan Kedu-Tegong-Ngadiroje (Bankeu), Pelebaran Jalan Kapatran-Medono (Bankeu), Pelebaran Jalan Muntung-Jumprit (Bankeu), Pelebaran Jalan Jumprit-Sibajag (Bankeu), Jasa Konsultansi Perencanaan-Review DED Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Jasa Konsultansi Pengawasan - Pelebaran Jalan Bantir-Wonobooyo, Lebaran Jalan	Terlaksananya pelebaran jalan di 5 ruas, 1 konsultan perencana dan 3 konsultan pengawas yaitu Pelebaran Jalan Bantir-Wonobooyo (Bankeu), Pelebaran Jalan Kedu-Tegong-Ngadiroje (Bankeu), Pelebaran Jalan Kapatran-Medono (Bankeu), Pelebaran Jalan Muntung-Jumprit (Bankeu), Pelebaran Jalan Jumprit-Sibajag (Bankeu), Jasa Konsultansi Perencanaan-Review DED Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, Jasa Konsultansi Pengawasan - Pelebaran Jalan Bantir-Wonobooyo, Lebaran Jalan	-	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Muntung-Jumprit dan Pelebaran Jalan Kepatran-Medono, Jasa Konsultansi Pengawasan - Pelebaran Jalan Kedu-Tegong-Ngadirejo, Jasa Konsultansi Pengawasan - Pelebaran Jalan Jumprit-Sibajag	Muntung-Jumprit dan Pelebaran Jalan Kepatran-Medono, Jasa Konsultansi Pengawasan - Pelebaran Jalan Kedu-Tegong-Ngadirejo, Jasa Konsultansi Pengawasan - Pelebaran Jalan Jumprit-Sibajag			
				4) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya rekonstruksi jalan di 7 ruas jalan, konsultan perencanaan 6 paket dan 2 konsultan pengawas yaitu Peningkatan Jalan Bejen - Congkrang (Batas Kabupaten), Peningkatan Jalan Greges – Banaran, Peningkatan Jalan Jangleng – Porot, Cor Beton Ruas Jalan Jumo-Ketitang, Peningkatan Jalan Rowo Seneng - Sirandu (Batas	Terlaksananya rekonstruksi jalan di 7 ruas jalan, konsultan perencanaan 6 paket dan 2 konsultan pengawas yaitu Peningkatan Jalan Bejen - Congkrang (Batas Kabupaten), Peningkatan Jalan Greges – Banaran, Peningkatan Jalan Jangleng – Porot, Cor Beton Ruas Jalan Jumo-Ketitang, Peningkatan Jalan Rowo Seneng - Sirandu (Batas	-	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kabupaten), Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Kaloran (DAK), Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Jumo (DAK), Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket I, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket II, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket III, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket IV, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi	Kabupaten), Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Kranggan - Kaloran (DAK), Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Muntung - Jumo (DAK), Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket I, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket II, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket III, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket IV, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jalan Paket V, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket VI, Jasa Konsultansi Pengawasan (Rekonstruksi Jalan), Jasa Konsultansi Pengawasan (Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan DAK)	Jalan Paket V, Jasa Konsultansi Perencanaan - Database Kondisi Jalan Paket VI, Jasa Konsultansi Pengawasan (Rekonstruksi Jalan), Jasa Konsultansi Pengawasan (Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan DAK)			
				5) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	1 Kegiatan fasilitasi bankeudes kebina margaan	1 Kegiatan fasilitasi bankeudes ke bina margaan	-	-	-
				6) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di 4 ruas jalan dan 1 konsultan pengawasan yaitu Pemeliharaan Berkala Jalan Janggleng-Gandon, Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan-Klepu, Pemeliharaan Berkala Jalan Lempuyang-Tretep (talud dan gorong-orong),	Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan di 4 ruas jalan dan 1 konsultan pengawasan yaitu Pemeliharaan Berkala Jalan Janggleng-Gandon, Pemeliharaan Berkala Jalan Kranggan-Klepu, Pemeliharaan Berkala Jalan Lempuyang-Tretep (talud dan gorong-orong),	-	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep-Donorejo dan Jasa Konsultansi Pengawasan	Pemeliharaan Berkala Jalan Tretep-Donorejo dan Jasa Konsultansi Pengawasan			
				7) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksana 26 paket pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan meliputi yaitu Belanja Bahan - Bahan bangunan dan Konstruksi Aspal Buton CPHMA Pemeliharaan Rutin Jalan Regional I Temanggung, Regional III Ngadirejo, Regional IV kranggan dan Regional VI Tembarak, Aspal Buton CPHMA Regional II Parakan, Aspal Buton CPHMA Regional V Kandangan, Aspal Drum, Aspal Hot Mix AC-WC, Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan	Terlaksana 26 paket pekerjaan untuk pemeliharaan rutin jalan meliputi yaitu Belanja Bahan - Bahan bangunan dan Konstruksi Aspal Buton CPHMA Pemeliharaan Rutin Jalan Regional I Temanggung, Regional III Ngadirejo, Regional IV kranggan dan Regional VI Tembarak, Aspal Buton CPHMA Regional II Parakan, Aspal Buton CPHMA Regional V Kandangan, Aspal Drum, Aspal Hot Mix AC-WC, Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan	-	-	-

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Konstruksi Paket 1 Regional I dan Regional VI, Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi Paket 2 Regional II dan Regional III, Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi 3 Regional IV dan Regional V, semen, Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional I Temanggung), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional II Parakan), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base	Konstruksi Paket 1 Regional I dan Regional VI, Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi Paket 2 Regional II dan Regional III, Belanja Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi 3 Regional IV dan Regional V, semen, Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional I Temanggung), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional II Parakan), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kondisi Jembatan Regional III Ngadirejo), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional IV Kranggan), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional V Kandangan), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional VI Tembarak), Pengadaan Alat Berat - Tandem Roller 2,5 ton - Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV	Kondisi Jembatan Regional III Ngadirejo), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional IV Kranggan), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional V Kandangan), Jasa Konsultansi Perencanaan (Konsultan Penyusunan Data Base Kondisi Jembatan Regional VI Tembarak), Pengadaan Alat Berat - Tandem Roller 2,5 ton - Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Regional IV			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kranggan, Program Preservasi Jalan Regional I Temanggung, Program Preservasi Jalan Regional II Parakan, Program Preservasi Jalan Regional III Ngadirejo, Program Preservasi Jalan Regional IV Kranggan, Program Preservasi Jalan Regional V Kandangan, Program Preservasi Jalan Regional VI Tembarak, Pemeliharaan Jembatan Kali Datar, Preservasi Jalan Lempuyang-Tretep, aspal padat	Kranggan, Program Preservasi Jalan Regional I Temanggung, Program Preservasi Jalan Regional II Parakan, Program Preservasi Jalan Regional III Ngadirejo, Program Preservasi Jalan Regional IV Kranggan, Program Preservasi Jalan Regional V Kandangan, Program Preservasi Jalan Regional VI Tembarak, Pemeliharaan Jembatan Kali Datar, Preservasi Jalan Lempuyang-Tretep, aspal padat			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jembatan kali mlulon dan konsultan pengawas	Terlaksananya pemeliharaan jembatan kali mlulon dan konsultan pengawas	-	-	-
				<b>8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi</b>					
				<b>Tersedianya layanan informasi jasa konstruksi</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100%	100%			
				1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi			
				<b>9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>					
				<b>Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang</b>	<b>87,90%</b>	<b>89,35%</b>			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	-	-	-
				b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Aplikasi SIMTARU	Tersedianya Aplikasi SIMTARU			
				c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
		<b>Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup</b>		<b>10. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>					
				a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA /TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS 3R sebanyak 1 unit	Pembangunan TPS 3R sebanyak 1 unit			
			Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<b>11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>					
				<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>	100 %	82,44 %			
			a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%				

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Terfasilitasinya DAK Reguler Sanitasi dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sebanyak 2 kegiatan	Terfasilitasinya DAK Reguler Sanitasi dan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat sebanyak 2 kegiatan			
				2) Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya IPAL komunal Skala Permukiman sebanyak 1 kegiatan	Terbangunnya IPAL komunal Skala Permukiman sebanyak 1 kegiatan			
4	Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		<b>1. Program Pengembangan Perumahan</b>					
				<b>Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</b>	<b>7,72 %</b>	<b>9,72 %</b>			
				<b>Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi</b>	<b>86,76 %</b>	<b>82,44 %</b>			
				a. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa sebanyak 1 kegiatan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa sebanyak 1 kegiatan			
				<b>2. Program Kawasan Pemukiman</b>					
				<b>Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>88,30 %</b>	<b>90,28 %</b>	<b>Terkendala masalah refocusing sehingga anggaran APBD tidak dapat direalisasikan</b>	<b>Memaksimalkan pengusulan RTLH dari sumber APBN dan APBD Provinsi</b>	
				<b>Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan</b>	<b>18,75 %</b>	<b>9,19 %</b>			
			Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<b>Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</p> <p>1) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>2) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</p>	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terbangunnya Rumah Layak Huni sebanyak 60 unit	Terbangunnya Rumah Layak Huni sebanyak 60 unit			
				2) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terfasilitasinya Stimulan Rumah Swadaya dan Kota tanpa Kumuh sebanyak 1 kegiatan	Terfasilitasinya Stimulan Rumah Swadaya dan Kota tanpa Kumuh sebanyak 1 kegiatan			
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
				Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati	100%	100%			
				Rasio Linmas per RT	1,62	1,44			
				Persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	100%			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<p>a. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>	100%	100%			
				<p>1) Sub kegiatan pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, &amp; Pengawasan</p>	12 bulan	12 bulan			
				<p>2) Sub kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa</p>	12 bulan	12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			
				4) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan			
				5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12 bulan	12 bulan			
				<b>b.</b> Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	12 bulan		•	
				<b>2. Program Penanggulangan Bencana</b>					
				a. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	7 bulan	7 bulan			
				<b>3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>					
				Cakupan Penanganan bencana kebakaran kabupaten	60,64%	60,64%			
				Tingkat waktu tanggap (respon time rate)	69,8%	47,72%			
				Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	42	310			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Presentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi</b>	<b>42%</b>	<b>32,14%</b>			
				<b>Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>76,67%</b>			
				a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	12 bulan	12 bulan			
				2) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	12 bulan	12 bulan			
				b. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi kebakaran	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 bulan	12 bulan			
				c. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan kebakaran	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	12 bulan	12 bulan			
		<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>		<b>5. Program Penanggulangan Bencana</b>					
				<b>Cakupan desa tangguh bencana</b>	<b>8,57 %</b>	<b>8,29 %</b>			
				<b>Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana	100 %	100 %			
				Persentase Tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat bencana	100 %	100 %			
				Persentase desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	70,1 %	67,74 %			
				Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100 %	100 %			
				Persentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana	100 %	100 %			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %			
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	12 bulan	12 bulan			
				b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	11 Kegiatan	11 Kegiatan			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	25 Unit	25 Unit			
				3) Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5 Desa	4 Desa	Refocusing anggaran hanya untuk 4 Desa	Mengupayakan anggaran dana desa di desa rawan bencana untuk mengadakan penguatan kapasitas relawan	
				4) Sub kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			
				c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	12 bulan	12 bulan			



N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kot	12 bulan	12 bulan			
				3) Sub kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			
				4) Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			
<b>6</b>	<b>Sosial</b>	<b>Dinas Sosial</b>	Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan	<b>1. Program Pemberdayaan Sosial</b>					
				<b>Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Pengumpulan Sumbangan ke Masyarakat sejumlah 60 orang	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi Pengumpulan Sumbangan ke Masyarakat sejumlah 60 orang			
					Terlaksananya Restorasi Sosial dan Pemeliharaan nilai kepahlawanan sebanyak 1 kegiatan	Terlaksananya Restorasi Sosial dan Pemeliharaan nilai kepahlawanan sebanyak 1 kegiatan			
				b. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS sebanyak 40 orang	Jumlah Karang Taruna yang Terlibat dalam Penanganan PPKS sebanyak 40 orang			•
					Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang terlibat			•

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dalam Penanganan PPKS sebanyak 289 orang	dalam Penanganan PPKS sebanyak 289 orang			
					Jumlah TAGANA yang terlibat dalam Penanganan PPKS sebanyak 60 orang	Jumlah TAGANA yang terlibat dalam Penanganan PPKS sebanyak 60 orang			•
				2) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang Terlibat dalam Penanganan PPKS sejumlah 20 orang	Jumlah TKSK yang Terlibat dalam Penanganan PPKS sejumlah 20 orang			•
				3) Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS di 20 Kecamatan	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Keluarga Pioner Untuk Peran Serta dalam Penanganan PPKS di 20 Kecamatan			
				4) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Bantuan hibah Sarpras bagi 4 Panti	Bantuan hibah Sarpras bagi 4 Panti			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Bansos Sarpras Panti sejumlah 1 kegiatan	Terfasilitasinya Bansos Sarpras Panti sejumlah 1 kegiatan			
					Terfasilitasinya Bansos Sembako bagi 47.742 KK	Terfasilitasinya Bansos Sembako bagi 47.742 KK			
					Terfasilitasinya Kegiatan FKKT sejumlah 3 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan FKKT sejumlah 3 kegiatan			
					Terfasilitasinya Kegiatan IPSM sejumlah 1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan IPSM sejumlah 1 kegiatan			
					Terfasilitasinya Kegiatan KOMDA LANSIA sejumlah 1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan KOMDA LANSIA sejumlah 1 kegiatan			
					Terfasilitasinya Kegiatan LKKS sejumlah 1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan LKKS sejumlah 1 kegiatan			
					Terfasilitasinya Kegiatan WKSBM di 96 desa	Terfasilitasinya Kegiatan WKSBM di 96 desa			
					Terfasilitasinya 5 unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Terfasilitasinya 5 unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Terfasilitasinya Kegiatan LK3 sejumlah 1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan LK3 sejumlah 1 kegiatan			
				<b>2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</b>					
				<b>Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi ke daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa Kelurahan asal	100 %	100 %			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terbantunya 10 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif	Terbantunya 10 orang Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan untuk dapat memenuhi kehidupan dasarnya melalui Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif			
				<b>3. Program Rehabilitasi Sosial</b>					
				<b>Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Persentase rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial di luar panti sosial</b>	<b>1,22 %</b>	<b>4,22 %</b>			
				a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%			
				1) Sub kegiatan: Penyediaan Permakanan	Tersedianya Kebutuhan Makanan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan org atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial	Tersedianya Kebutuhan Makanan bagi klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan org atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial (100%)			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Kebutuhan sandang bagi 100 kasus klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial	Penyediaan Kebutuhan sandang bagi 100 kasus klien Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan orang atau Tindak Kekerasan Terlantar pada Rumah Perlindungan Sosial			
				3) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu bagi 40 orang Disabilitas (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)	Tersedianya alat bantu bagi 40 orang Disabilitas (kursi roda anak, kursi roda standar Dewasa, Alat Bantu Jalan, Kaki Palsu Hand Made, Wheel Chair Kursi roda adaptif bagi anak berkebutuhan khusus, Walker alat bantu jalan, Tongkat Betra, dan Kruk)			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				4) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelayanan Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS sejumlah 1 kegiatan	Terlayannya Reunifikasi Keluarga Disabilitas, Tuna Sosial dan Klien RPS sejumlah 1 kegiatan			
				5) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penyediaan Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan sosial bagi 25 orang klien penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar	Tersedianya Fasilitas Bimbingan Fisik, mental dan sosial bagi 25 orang klien penyandang Disabilitas, Tuna Sosial terlantar			
				6) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyediaan Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi 25 orang Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan dan orang terlantar	Tersedianya Bimbingan Fisik, mental dan Sosial bagi 25 orang Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Warga Negara Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan dan orang terlantar			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Layanan Pemberian Akses ke Layanan ke Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi 5 kasus Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar	Layanan Pemberian Akses ke Layanan ke Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi 5 kasus Klien Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan warga Negara Korban Perdagangan Orang atau Tindak kekerasan dan orang terlantar			
				8) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pembangunan Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sejumlah 1 kegiatan	Terbangunnya Gedung Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sejumlah 1 kegiatan			
				9) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyediaan Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga bagi 30 kasus	Tersedianya Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga bagi 30 kasus			
				10) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian rujukan bagi 100 kasus	Pemberian rujukan bagi 100 kasus			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Bantuan Transportasi untuk 40 kasus orang Terlantar dalam Perjalanan	Terfasilitasinya bantuan Transportasi untuk 40 kasus orang Terlantar dalam Perjalanan			
					Penyediaan Bantuan dan Asistensi Sosial untuk 132 kasus Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar	Tersedianya Bantuan dan Asistensi Sosial untuk 132 kasus Penanganan Anak dan Lanjut Usia Terlantar			
					Penyediaan Fasilitas Kegiatan Home Care bagi 40 kasus	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Home Care bagi 40 kasus			
					Pemberian Layanan Kedaruratan Kasus Viral Keterlantaran bagi 10 kasus	Pemberian Layanan Kedaruratan Kasus Viral Keterlantaran bagi 10 kasus			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Pemberian honor bagi Pendamping Sosial Honorer Panti sebesar 100%	Pemberian honor bagi Pendamping Sosial Honorer Panti sebesar 100%			
				3) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Penyediaan Honor Kegiatan Tim Teknis Penanganan PPKS dan Instruktur Kegiatan LUT/AT dan Home Care, Spritual dan Sosial sebesar 100%	Pemberian Honor Kegiatan Tim Teknis Penanganan PPKS dan Instruktur Kegiatan LUT/AT dan Home Care, Spritual dan Sosial sebesar 100%			
				4) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Penyediaan Fasilitas Kegiatan Terapy Psychososial dan rekreasional bagi LUT/AT serta kegiatan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Terapy Psychososial dan rekreasional bagi LUT/AT serta kegiatan sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar 100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				5) Sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sebesar 100%	Terfasilitasinya ATK untuk kegiatan LUT/AT dan Home Care Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sebesar 100%			
				6) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Akses ke layanan dan pendidikan dasar sebesar 100%	Akses ke layanan dan pendidikan dasar sebesar 100%			
				7) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyediaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelayanan Penelusuran Keluarga sebesar 100%			
				8) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Penyediaan layanan rujukan	Pelaksanaan layanan rujukan sebesar 100%			
				9) Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sebesar 100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>4. Prgram Perlindungan dan jaminan Sosial</b>					
				Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100 %	100 %			
				Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	75%	99 %			
				Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	85 %	100 %			
				Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	10 %	64 %			
				Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48 %	100 %			
				a. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Bantuan Permakanan anak di 8 Panti	Bantuan Permakanan anak di 8 Panti			
				2) Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar	Pelaksanaan Proses Adopsi Anak	Terlaksananya Proses Adopsi Anak sebesar 100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah/kota sebesar 100%	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah/kota sebesar 100%			
				2) Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Terkelolanya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS) sebesar 100%			
				3) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 60 orang dari Keluarga Fakir Miskin	Terfasilitasinya Bantuan Sosial untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi 60 orang dari Keluarga Fakir Miskin			
					Terfasilitasinya Kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebesar 100%	Terfasilitasinya Kartu Jateng Sejahtera (KJS) sebesar 100%			
					Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH bagi 32.900 KK	Terfasilitasinya Bisnis Proses PKH bagi 41.513 KK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya pandemi, kegiatan P2K2 tdk berjalan maksimal (tidak dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberi materi lewat media sosial dan video di bagikan ke KPM dan</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>melaksanakan pembinaan secara maksimal dalam pelaksanaan P2K2, untuk dapat mencapai graduasi peserta PKH)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPM tidak bisa melakukan pencairan.</li> <li>• KPM tdk masuk data bayar.</li> </ul>	<p>kunjungan home visit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dengan bank penyalur terkait kendala dan melaporkan secara berjenjang.</li> <li>• Melaporkan secara berjenjang dan melakukan perbaikan data di DTKS.</li> </ul>	
				4) Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE) bagi 5 kelompok masyarakat	Terfasilitasinya Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (KUBE) bagi 5 kelompok masyarakat			
				<b>5. Program Penanganan Bencana</b>					
				<b>Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Pemenuhan Kebutuhan dasar makanan bagi korban bencana alam da sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik	Terpenuhinya Kebutuhan dasar makanan bagi korban bencana alam da sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik sebesar 100%			
				2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Pemenuhan Kebutuhan dasar sandang bagi korban bencana alam da sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik	Terpenuhinya Kebutuhan dasar sandang bagi korban bencana alam da sosial di Kabupaten Temanggung dengan pengadaan bantuan logistik sebesar 100%			
				3) Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi 2.400 kematian	Terfasilitasinya Bantuan Sosial Santunan Kematian bagi 2.400 kematian			
				b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pengerahan relawan Tagana pada saat tanggap darurat bencana dengan bantuan transport ke lapangan	Terfasilitasinya pengerahan relawan Tagana pada saat tanggap darurat bencana dengan bantuan transport ke lapangan sebesar 100%			
					Penyediaan Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana	Terfasilitasinya Peralatan penunjang penanggulangan bencana forum Tagana dengan pengadaan perlengkapan forum Tagana sebesar 100%			
					Capacity Building dalam rangka peningkatan Skli Forum Tagana	Terlaksananya Capacity Building dalam rangka peningkatan Skill Forum Tagana sebanyak 1 keg			
					Penguatan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana (Forum KSB) bersama relawan Tagana dengan rakor dan pelatihan sebanyak 2 keg	Terlaksananya penguatan kelembagaan masyarakat di daerah rawan bencana (Forum KSB) bersama relawan Tagana dengan rakor dan pelatihan sebanyak 2 keg			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelaksanaan kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana selama 365 hari	Terlaksananya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam rangka penanggulangan bencana selama 365 hari			
					Rakor bersama relawan Tagana sebanyak 4 kegiatan	Terlaksananya Rakor bersama relawan Tagana sebanyak 4 kegiatan			
				<b>6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>					
				<b>Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan			

### 3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan wajib yang Tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					
				Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60 %	34,78 %			
				Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru atau telah bekerja	65 %	52,68 %			
				Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang	35 %	54 %			
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	112 orang	112 orang			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	75%			
				1) Sub kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	40 LPKS	30 LPKS	Terdampak Pandemi Covid-19	Penerapan teknologi digital dan protokol kesehatan di tempat kerja	
				c. Kegiatan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan Kecil	100%	54%			
				1) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	50 orang	27 orang	Terdampak Pandemi Covid 19	Penerapan teknologi digital dan protokol kesehatan di tempat kerja	
				<b>2. Program Penempatan Tenaga Kerja</b>					
				<b>Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)</b>	<b>74,37 %</b>	<b>58,73 %</b>			
				<b>Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan</b>	<b>75 %</b>	<b>78,01 %</b>			
				<b>Tingkat setengah pengangguran</b>	<b>5,9 %</b>	<b>11,66 %</b>			
				<b>Persentase tenaga kerja formal</b>	<b>29 %</b>	<b>24,17 %</b>			
				a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pelayanan Antar Kerja	1.000 orang	1.087 orang			
				2) Sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	450 orang	450 orang			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	12 bulan	12 bulan			
				2) Sub kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	1 paket	1 paket			
				<b>3. Program Hubungan Industrial</b>					
				<b>Proporsi kepesertaan BPJS ketenagakerjaan</b>	<b>77 %</b>	<b>61,68 %</b>	Masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan UMK.	Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian upah minimum.	DINPERINAKER telah melaksanakan sosialisasi penerapan UMK Tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2021 bersama Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kab. Magelang dan keikutsertaan dalam BPJS ketenagakerjaan yang diikuti oleh 40 (empat puluh) perusahaan skala menengah dan besar se-Kabupaten Temanggung.
			<b>Persentase perusahaan yang membayar upah sesuai UMK</b>	<b>83 %</b>	<b>57,27 %</b>				
			<b>Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial</b>	<b>30 %</b>	<b>33,96 %</b>				
			<b>Persentase perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</b>	<b>100 %</b>	<b>82,35 %</b>				

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	9 PP	9 PP			
				2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	36 Kegiatan	36 Kegiatan			
				b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja & Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120 Kegiatan	120 Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				3) Sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPAPKB		1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
				Persentase keterwakilan perempuan di lembaga Pemerintah	2,32 %	1,79	Partisipasi perempuan dalam Lembaga pemerintah dipengaruhi peluang seleksi	Penguatan advokasi dan edukasi keterlibatan perempuan dalam lembaga pemerintahan	
				Rasio perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan	38,57 %	45,65 %	Masih kurangnya pemahaman petugas dalam penyusunan ARG	Penguatan dan pendampingan dalam penyusunan ARG	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	29 kegiatan	29 Kegiatan			
				b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 kegiatan	3 kegiatan			
				<b>2. Program Perlindungan Perempuan</b>					
				<b>Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak Perempuan</b>	<b>0,011%</b>	<b>0,0021%</b>	<b>Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas</b>	<b>Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping</b>	
				<b>Persentase Perempuan korban kekerasan</b>	<b>0,013 %</b>	<b>0,0013%</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 keg	7 keg			
				b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 keg	3 keg			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				c. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 keg	6 keg			
				<b>3. Program Peningkatan Kualitas keluarga</b>					
				<b>Persentase desa sayang ibu dan bayi</b>	<b>20,76 %</b>	<b>31,49%</b>	masih adanya budaya masyarakat bahwa kehamilan, dan melahirkan menjadi urusan perempuan	penguatan dan advokasi dan sosialisitentan g GSI bersama mitra kerja	
				<b>Persentase rumah sakit sayang ibu dan bayi</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 keg	5 keg			
				<b>4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>					
				<b>Persentase terbentuknya kota layak anak</b>	<b>30%</b>	<b>80%</b>			
				<b>a. Kegiatan</b> Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	8 keg	8 keg			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KB	5 keg	5 keg			
				<b>5. Program Perlindungan Khusus Anak</b>					
				<b>Persentase anak korban kekerasan</b>	<b>0,012 %</b>	<b>0,0026</b>	<b>Keterbatasan dan kemampuan pendamping dan petugas</b>	<b>Pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas dan pendamping</b>	
				a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 keg	1 keg			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		<b>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan</b> <b>Rasio ketersediaan pangan</b> a. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1) Sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	100%	147,06%			
				<b>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat</b> <b>Persentase desa pelaksana program ketahanan pangan</b> a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	20,76%	28,03%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Upaya Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pangan Pokok Tanaman Pangan dan Pangan Lainnya di Tingkat Kabupaten serta koordinasi Sinkronisasi Luas Tambah Tanam, Luas Panen dan Produksi	Terlaksananya Upaya Khusus Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pangan Pokok Tanaman Pangan dan Pangan Lainnya di Tingkat Kabupaten serta koordinasi Sinkronisasi Luas Tambah Tanam, Luas Panen dan Produksi			
				b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi Kerawanana Pangan	Terlaksananya pengadaan pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam mengantisipasi Kerawanana Pangan			
				c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang bergizi, berimbang, sehat dan Aman melalui Pengembangan Tani Pekarangan dan Pengolahan Pangan Lokal dalam upaya penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat berbasis sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang bergizi, berimbang, sehat dan Aman melalui Pengembangan Tani Pekarangan dan Pengolahan Pangan Lokal dalam upaya penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat berbasis sumber Daya Lokal			
				<b>3. Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>					
				<b>Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan	Tersedianya sarana dan Prasarana pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah kabupaten untuk peningkatan mutu dan Keamanan Pangan			
4	Pertanahan			<b>1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>					
				<b>Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH)		1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup					
				Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	58,45 %	0 %	Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan yang menyebabkan indikator tidak dapat dihitung		
				Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	95,00 %	0 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya kesadaran beberapa pemrakarsa /pelaku usaha /kegiatan untuk mengajukan persetujuan sesuai dengan klasifikasi kegiatan/usahanya</li> <li>• Transisi kebijakan OSS terkait Undang-undang Cipta Kerja ke dalam aplikasimenjadi OSS berbasis resiko sehingga penerapan di lapangan masih terhambat</li> <li>• Terbitnya peraturan perundangan baru sehingga ada perubahan mekanisme pengajuan persetujuan</li> </ul>		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang berada di DPM sedangkan sistem tersebut belum terintegrasi dengan sistem informasi Lingkungan Hidup</li> <li>• Pada tahun 2021 Belum ada perusahaan yang mengajukan Persetujuan UKL-UPL dan AMDAL.</li> </ul>		
				a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>					
				Indeks Kualitas Air	46,00	54,45			
				Indeks Kualitas Udara	85,00	80,89			
				a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	40 Sampel	40 sampel			
				2) Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	100 %	100 %			
				3) Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Paket	1 Paket			
				b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1 Paket	1 Paket			
				2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Paket	1 Paket			
				<b>3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</b>					

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Indeks Kualitas Tutupan Lahan</b>	<b>74,33</b>	<b>74,33</b>			
				<b>Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung</b>	<b>0,067 %</b>	<b>0,10 %</b>	<b>Masih minimnya kesadaran sebagian masyarakat terkait penanganan lahan kritis</b>	<b>Melaksanakan Gerakan Konservasi Air dan Tanah Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung</b>	
				<b>Cakupan RTH Publik</b>	<b>0,07 %</b>	<b>1,10 %</b>			
				a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Pengelolaan Taman	12 Bulan	12 Bulan			
				2) Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	12 Bulan	12 Bulan			
				3) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	12 Bulan	12 Bulan			
				<b>4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</b>					
				<b>Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3</b>	<b>80,00 %</b>	<b>0 %</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketidaktaatan Usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3</li> <li>• Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu Permen LHK dan PP Nomor 22 Tahun 2021</li> </ul>	<b>Mendorong kegiatan dan/atau usaha untuk membuat rincian teknis limbah B3</b>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> <li>Pada tahun 2021 tidak ada kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan rincian teknis Limbah B3 sehingga tidak ada kajian terhadap rincian teknis limbah B3</li> </ul>		
				a. Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	100 %			
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 %	100 %			
				<b>5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>					
				<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup</b>	<b>80,00 %</b>	<b>100 %</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	50 Kegiatan/ usaha	50 Kegiatan/ usaha			
				<b>6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>					
				<b>Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup</b>	<b>66,67 %</b>	<b>82,35 %</b>			
				a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Sekolah Adiwiyata 10 Sekolah	Cakupan Sekolah Adiwiyata 12 Sekolah			
					Masjchun Sofyan Awards : 3 Desa/ Kelurahan 2 Individu 2 Kelompok/ Lembaga	Masjchun Sofyan Awards : 3 Desa/ Kelurahan 2 Individu 2 Kelompok/ Lembaga			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>					
				Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %	100 %			
				a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				<b>8. Program Pengelolaan Persampahan</b>					
			SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung	Persentase sampah yang tertangani	35,04 %	21,97 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut</li> <li>• Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah</li> <li>• Kurangnya tenaga pelayanan/kebersihan</li> <li>• Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga</li> <li>• Penambahan sarana dan prasarana</li> </ul>	



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap	<p>pengelolaan persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan tenaga pelayanan /kebersihan</li> <li>• Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar dapat menangani sampah dengan maksimal</li> <li>• Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA"</li> </ul>	
				<b>Cakupan layanan persampahan</b>	<b>50,00 %</b>	<b>53,63 %</b>			
				a. Kegiatan Pengelolaan Sampah	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota, Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota, Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan selama 12 Bulan	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan selama 12 Bulan			
					Terlaksananya penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan sebanyak 1 Paket	Terlaksananya penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan sebanyak 1 Paket			
				2) Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	7 Unit	7 Unit			
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1. Program Pendaftaran Penduduk					
				Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97.2%	98.38%			
				Persentase Kepemilikan KTP el	98.2%	99.71%			
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	62%	65.02%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan adminduk di 20 Kecamatan	terlaksananya pelayanan adminduk di 20 Kecamatan			
					tersedianya data penduduk yang valid di 14 desa	tersedianya data penduduk yang valid di 14 desa			
				2) Sub kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	terlaksananya penerbitan KIA di Kabupaten temanggung sebanyak 26.000 keping	terlaksananya penerbitan KIA di Kabupaten temanggung sebanyak 50.863 keping		melaksanakan Jemput Bola KIA ke Sekolah dan UPT	
				<b>2. Program Pencatatan Sipil</b>					
				<b>Persentase kepemilikan Akte Kelahiran</b>	<b>71%</b>	<b>70.2%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesadaran masyarakat usia di atas 40 tahun untuk mengurus akta kelahirannya masih kurang</li> <li>• adanya pembatasan pelayanan langsung selama PPKM sementara sebagian penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melaksanakan jemput bola sampai ke tk Desa dalam rangka mendekatkan pelayanan ke masyarakat dukcapil membuat inovasi DESA PERMATA dengan ini</li> </ul>	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<b>kab. Temanggung belum familiar dengan pelayanan online terkendala jaringan untuk dapat mengakses pelayanan secara online</b>	<b>penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan di tingkat Desa</b>	
				<b>Persentase penerbitan akte kematian</b>	<b>96.5%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	100 %	94,85%			
				1) Sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	terbitnya 50 akta perceraian non muslim	terbitnya 42 akta perceraian non muslim	jumlah pencatatan perceraian tergantung dengan jumlah putusan perceraian non muslim diterbitkan oleh PN Temanggung	Dindik capil telah melaksanakan kerja sama dengan PN (Inovasi BERKIBAR) untuk mengcover setiap putusan peristiwa kependudukan dari PN Temanggung agar peristiwa kependudukan dimaksud bisa tercatat di Dindikcapil	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					terbitnya 235 akta perkawinan non muslim	terbitnya 200 akta perkawinan non muslim	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah pencatatan perkawinan sesuai dengan jumlah pemberkatan perkawinan yang di daftarkan di Dindikcapil dengan adanya PPKM jumlah pemohon perkawinan menurun</li> </ul>	melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan Pemuka agama non muslim di Kabupten Temanggung untuk memastikan setiap pemberkatan yang dilaksanakan tercatat di Dindikcapil	
					terlaksananya fumigasi ruang arsip seluas 840 m <sup>3</sup>	terlaksananya fumigasi ruang arsip seluas 840 m <sup>3</sup>			
					tersedianya extra fooding 11 orang petugas pengelola arsip	tersedianya extra fooding 11 orang petugas pengelola arsip			
				2) Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	terbitnya 11.000 akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait	terbitnya 12.875 akta kelahiran bekerjasama dengan instansi terkait			
					terbitnya 6.000 akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait	terbitnya 6.507 akta kematian bekerjasama dengan instansi terkait		Melaksanakan keput bola Akta kelahiran samapai tk Desa	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					
				<b>Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan</b>	<b>20%</b>	<b>83.87%</b>			
				<b>Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil</b>	<b>70%</b>	<b>79.17%</b>			
				a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan selama 12 bulan	terlaksananya pemanfaatan dan penyajian database kependudukan selama 12 bln			
					tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat selama 12 bulan	tersedianya informasi yang dapat diakses masyarakat selama 12 bulan			
					terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil sebanyak 3 inovasi	terselenggara inovasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan dan capil sebanyak 3 inovasi			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	terlaksananya pelayanan adminduk selama 12 bulan	terlaksananya pelayanan adminduk selama 12 bulan			
					terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el selama 12 bulan	terlaksananya pemeliharaan hardware dan software SIAK dan Pemeliharaan KTP el selama 12 bulan			
					terlaksananya pengelolaan jaringan siak dan KTP el di 20 Kecamatan	terlaksananya pengelolaan jaringan siak dan KTP el di 20 Kecamatan			
					tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat selama 12 bulan	tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat selama 12 bulan			
					tersedianya peralatan mobile KTP el	tersedianya peralatan mobile KTP el			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		<b>1. Program Penataan Desa</b>					
				Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	30%	30%			
				Persentase Desa/ Kelurahan yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa	33%	33%			
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	25%	25%			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi sarana dan prasarana desa	3 kegiatan	3 kegiatan			
				<b>2. Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>					
				Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah di tetapkan	100%	100%			
				a. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	3 kegiatan	3 kegiatan			
				<b>3. Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>					



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa	Indikator program Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	70%	70%			
				Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	70%	70%			
				Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	75%	75%			
			Perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	95%	95%			
			Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	10%	10%			
			Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	80%	80%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa</b>	<b>Persentase desa yang tertib pengelolaan aset</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>			
				a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Asministrasi Pemerintahan Desa	1 kecamatan	1 kecamatan			
				2) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 dokumen	1 dokumen			
				3) Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 desa	266 desa			
				4) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	20 kecamatan	20 kecamatan			
				5) Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1 desa	1 desa			
				6) Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	20 kec	20 kec			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7) Sub kegiatan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	266 desa	266 desa			
				<b>4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum ADAT</b>					
			o PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes o Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUM Desa Bersama	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	26%	26%			
			Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10%	10%			
				a. Kegiatan pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat tingkat daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dengan daerah Kabupaten/Kota					
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20 kecamatan	20 kecamatan			
				2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	40 kelompok	40 kelompok			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3) Fasilitas Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	20 kecamatan	20 kecamatan			
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DPPPAPPKB		1. Program Pengendalian Penduduk					
				persentase penyediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan	100 %	100 %			
				persentase pasangan usia subur yang ingin ber -KB tidak terpenuhi/unmet need	6,72 %	12,99%	1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya ikut KB 2. Rendahnya pemahaman batasan PUS bisa hamil (merasa tua tidak perlu KB	mengoptimalkan tim Advokasi KKBPK Peningkatan kapasitas pengelola program KKBPK dari tingkat RT sampai Desa , kecamatan dan Kabupaten	
				Persentase Pasangan Usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun	2,06 %	1,02%	Masih kurangnya SDM pengelola program KKBPK dilapangan dalam memberikan advokasi dan KIE pada masyarakat dan remaja Masih aturan pemerintah yang berbeda antar OPD	Melakukan promisi , KIE melalui media cetak , Elektronik	
				Angka kelahiran Remaja Usia 15 - 19 tahun (ASFR 15-19 th)	26,8 %	9,80%	Masih tingginya kelahiran oleh kelo,pok umur dibawah 19 tahun, dampak dari covid 19 dan kebebasan remaja dalam mengakses media sosial yang salah	Peningkatan advokasi dan KIE kepada remaja dan pemberdayaan Forum GENRE, Kelompok pik Remaja dan BKR tentang Kesehatan Reproduksi Sehat bagi Remaja	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. <b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangk Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	12 bulan	12 bulan			
				b. <b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 bulan	12 bulan			
				<b>2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>					
				<b>Persentase kepesertaan KB aktif</b>	<b>75,57%</b>	<b>75,29%</b>			
				<b>Persentase keberhasilan pemakaian metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</b>	<b>48,54%</b>	<b>45,21%</b>			
				<b>Persentase kampung KB yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM)</b>	<b>33,9 %</b>	<b>33,85%</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	12 bulan	12 bulan			
				2) Sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	12 bulan	12 bulan			
				<b>b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 bulan	12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Penggerakan kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12 bulan	12 bulan			
				<b>c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %	96,22 %			
				1) Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 bulan	12 bulan			
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3.520 orang	3.121 orang			
				3) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	3 kegiatan	3 kegiatan			
				<b>d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi</b>	100 %	100 %			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>					
				1) Sub kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	12 kegiatan	12 kegiatan			
				2) Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	12 kegiatan	12 kegiatan			
				<b>3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>					
				<b>Indeks pembangunan Keluarga</b>	<b>40 %</b>	<b>55,97</b>			
				a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) (DPPPAPKB))	2 kegiatan	2 kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	20 kelompok	20 kelompok			
				3) Sub kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 kelompok	20 kelompok			
				4) Sub kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 bulan	12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
				Persentase ruas jalan yang didukung sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai	36,23%	35,27%	Terbatasnya anggaran untuk mencukupi kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan di jalan kabupaten/kota	Anggaran Penyediaan perlengkapan jalan dapat diusulkan melalui sektor anggaran diluar APBD (DAK / Bankeu) sehingga kebutuhan penyediaan perlengkapan Jalan dapat tetap dipenuhi. Selain itu kita perlu memprioritaskan kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan kabupaten yang paling mendesak untuk ditangani.	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase potensi titik parkir yang tertangani	97,27%	98,18%			
				Persentase Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	99,68%	96,28%	Kesadaran pemilik kendaraan wajib uji kendaraannya secara berkala masih rendah.	Perlu adanya kegiatan sosialisasi dan informasi terkait dengan pentingnya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan bagi keselamatan LLAJ, serta peningkatan pemeriksaan kelaikan kendaraan wajib uji di jalan guna memastikan operasional kendaraan di jalan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan	
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 1 Yang Memenuhi Standar	25,00%	25%			
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 2 Yang Memenuhi Standar	37,50%	37,50%			
				Prosentase Bengkel Umum Kelas 3 Yang Memenuhi Standar	56,52%	56,52%			
			Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung	Persentase Angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan trayek	84,62%	80%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			g Nomor 25 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021	Prosentase Terminal Tipe C Yang Aktif	100%	100%			
				Prosentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik	85,71%	85,71%			
				Persentase penerangan jalan di ruas jalan kabupaten	11,56%	31,69%			
				a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Paket	4 Paket			
				2) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	12 bln	12 bln			
				3) Sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan Perlengkapan Jalan	12 bln	12 bln			
				b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	12 bln	12 bln			Mempersiapkan area pelataran Terminal Temanggung Permai, terutama pada akses masuk dan keluar agar mudah dilalui angkutan umum

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal tipe C	12 bln	12 bln			Mempersiapkan area untuk parkir (mangkal) angkutan umum di dalam Terminal Temanggung Permai
				<b>c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln			-
				<b>d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	12 bln	12 bln			
				<b>e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</b>	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 kegiatan	100 kegiatan			Melakukan Uji coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk memasukkan angkutan umum ke dalam Terminal Temanggung Permai
				<b>f. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	15 kegiatan	15 kegiatan			
				<b>g. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bln	12 bln			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO		1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik					
				Persentase PPID badan publik yang aktif	15%	14,66%			
				Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	20%	21,88%			
				Persentase kepatuhan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) terhadap norma siaran	100%	100%			
				a. Kegiatan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
			o UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1) Sub kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 bulan	12 bulan			
			o UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik o UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik o PP No. 61 Tahun 2010 tentang	2) Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 bulan	12 bulan			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelaksanaa n Undang- undang KIP o Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentas i dan Informasi Pemerintah Daerah o Permenpan RB No. 62 Th 2018 tentang Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional						
			o "UU No. 36 Th 1999 tentang Telekomunik asi o UU No. 32 Th 2002 tentang Penyiaran o PP No. 52 Th 2000 tentang Penyelengg araan Telkomunika si	3) Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 bulan	12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ PP No. 11 Th 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik</li> <li>○ Perda No. 5 Th 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kab. Temanggung</li> <li>○ Perbub No. 25 Th 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kab. Temanggung</li> <li>○ Perda No. 12 Th 2017 tentang Lembaga Penyiaran</li> </ul>						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Publik Lokal Temanggung TV Kab. Temanggung o Perbub No. 23 Th 2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kab. Temanggung"						
			o UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4) Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik	12 bulan	12 bulan			
			o PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang KIP	5) Sub kegiatan Layanan Hubungan Media	3 kegiatan	3 kegiatan			
			o Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi						

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pemerintah Daerah o Perbub No. 55 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Temanggung						
			o Pergub Jateng No.3 Tahun 2014	6) Sub kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 kegiatan	3 kegiatan			
			o Keputusan Ka.Dinkominfo Kab.Temanggung No.555/149 /II/2018	7) Sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	12 kegiatan	12 kegiatan			
			o Keputusan Pengurus Propinsi Jateng FK METRA No. 0137/FK Metra-Jateng/II/2016	8) Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3 kegiatan	3 kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program Aplikasi Informatika</b>					
				Persentase ketersediaan jaringan intranet	100%	88,10%			
				Persentase sistem informasi yang terintegrasi	30%	16,99%			
				Persentase sistem informasi yang berfungsi optimal	50%	52,15%			
				Persentase ketersediaan akses internet publik	100%	73,33%			
				a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			
				1) Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	700 jaringan	800 jaringan			
				b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan			
				2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
				3) Sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	462 aplikasi	512 aplikasi			
				4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 kegiatan	1 kegiatan			
				5) Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	12 bulan	12 bulan			
				6) Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah RI Nomor 17/per/m.ku km/ix/2015 tentang pengawasan koperasi	<b>1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</b>					
				<b>Persentase koperasi aktif</b>	<b>10,5%</b>	<b>19,22%</b>			
				a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 koperasi	30 koperasi			
			PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM disusun	<b>2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</b>					
				<b>Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota penambahan nilai asset dan omset koperasi</b>	<b>22 %</b>	<b>8 %</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 UKM	30 UKM			
				<b>3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro</b>					
				<b>Persentase usaha mikroaktif</b>	<b>33,5%</b>	<b>33,07%</b>			
				a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	30 UKM	30 UKM			
				2) Sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	30 UKM	30 UKM			
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal		<b>1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>					
				<b>Nilai Realisasi Investasi</b>	<b>432 M</b>	<b>1.496,68 M</b>			
				<b>Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi</b>	<b>10%</b>	<b>28.32%</b>			
				<b>Persentase Ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				1) Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program Promosi Penanaman Modal</b>					
				<b>Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	8 Kegiatan dan 200 orang	8 Kegiatan dan 200 orang			
				<b>3. Program Pelayanan Penanaman Modal</b>					
				<b>Persentase pelayanan perizinan online</b>	<b>100%</b>	<b>98,34%</b>			
				<b>Persentase perizinan yang bebas calo</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	12 Bulan	12 Bulan			
				2) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	12 bulan	12 bulan			
				<b>4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		3			
				<b>Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan</b>	<b>100%</b>	<b>93.53%</b>			
				<b>Persentase Pengaduan masyarakat yang terselesaikan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				<b>Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
				a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	12 bulan			
				2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				3) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		<b>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>					
				<b>Indek Pembangunan Kepemudaan (IPP)</b>	<b>3,50%</b>	<b>3,78 %</b>			
				a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	35 Orang	52 Orang			
				b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
				<b>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</b>					
				<b>Indek Pembangunan Olahraga (IPO)</b>	<b>3,00%</b>	<b>3,31 %</b>			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan			
				b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				2) Sub kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	50 Orang	66 Orang			
				c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2 Lokasi	2 Lokasi			
				d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Lokasi	1 Lokasi			
				<b>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>					
				a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Lokasi	1 Lokasi			
14	Statistik	DINKOMINFO		<b>1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>					
				<b>Cakupan ketersediaan data makro daerah</b>	<b>100%</b>	<b>66,7%</b>			
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	91,6%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> <li>o UU 16 TAHUN 1997 tentang Statistik</li> <li>o Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> </ul>	1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 kegiatan	3 kegiatan	Updating data yang berasal dari OPD kurang cepat	Perlu meningkatkan intensitas sosialisasi kepada OPD tentang kesadaran akan pentingnya data	
				2) Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	1	0,75	Kurangnya pemahaman akan definisi, parameter pengolahan dan penyajian metadata	Perlu dilaksanakan pelatihan tentang penyusunan metadata statistik sektoral	
				3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	Aplikasi untuk updating data terkendala teknis dalam penambahan dan perubahan elemen data yang disebabkan oleh platform aplikasi yang sulit dirubah sesuai perkembangan data	Perlu pembuatan aplikasi pengganti bank data pembangunan	
15	Persandian	DINKOMINFO		1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi					
				Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12,5	20,59			



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
			o UU 16 TAHUN 1997 tentang Statistik o Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	1) Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	Keterbatasan Anggaran dari APBD Kabupaten Temanggung sehingga kualitas pelaksanaan keamanan informasi di Kabupaten Temanggung belum optimal	bekerja sama dengan Provinsi Jateng dan BSSN terkait pelaksanaan keamanan informasi yang belum mampu dilakukan Pemerintah Kabupten Temanggung	
16	Kebudayaan	DINBUDPAR		1. Program Pengembangan Kebudayaan					
				Persentase kelompok Seni Budaya yang aktif produktif	64,51%	21,67%	Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya	Membentuk Komite Seni Budaya Nusantara (KSNB) yang diantara anggotanya dari kalangan akademisi/ sekolah	

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/kota	100%	100%			
				1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	16 Event	16 Event			
				b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/kota	100%	100%			
				1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	210 Kelompok	210 Kelompok			
				2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				<b>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional</b>					
				<b>Persentase kelompok Seni Budaya yang aktif produktif</b>	<b>64,51%</b>	<b>35%</b>	<b>Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya</b>	<b>Membentuk Komite Seni Budaya Nusantara (KSNB) yang diantara anggotanya dari kalangan akademisi/sekolah</b>	
				a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kab/kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Sub kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	10 Event	10 Event			
				<b>3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</b>					
				<b>Persentase Pelestarian Cagar Budaya</b>	<b>4,15%</b>	<b>3,63%</b>	<b>Kurangnya SDM Cagar Budaya</b>	<b>Pemenuhan SDM Kebudayaan</b>	
				a. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pelindungan Cagar Buday	3 Kegiatan/ Lokasi	3 Kegiatan /Lokasi			
				2) Sub kegiatan Pengembangan Cagar Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				<b>4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>					
				<b>Persentase obyek wisata yang berkembang</b>	<b>33,33%</b>	<b>31,25%</b>	<b>Adanya pembatasan kegiatan pariwisata yang di sebabkan Pandemi Covid-19</b>	<b>Menunggu pandemi berakhir dan berinovasi</b>	
				a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik wisata					
				1) Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	100%			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Sub kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			
				3) Sub kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			
				4) Sub kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	12 kegiatan	12 kegiatan			
				5) Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12 kegiatan	12 kegiatan			
				<b>5. Program Pemasaran Pariwisata</b>					
				<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan</b>	<b>19%</b>	<b>-0,86%</b>	<b>Adanya pembatasan kegiatan pariwisata yang di sebabkan Pandemi Covid-19</b>		
				a. Kegiatan Lama Tinggal Wisatawan	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan	12 kegiatan	12 kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
				2) Sub kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	12 kegiatan	12 kegiatan			
				<b>6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</b>					
				<b>Persentase Peningkatan Desa Wisata</b>	<b>7,51%</b>	<b>92,14%</b>			
				<b>Persentase desa wisata naik klasifikasi</b>	<b>7,51%</b>	<b>0%</b>	<b>Belum adanya Standar yang pasti dan legal mengenai Klasifikasi Desa wisata</b>	<b>Pembuatan Perbup tentang Desa Wisata</b>	
				<b>Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft</b>	<b>7,51%</b>	<b>0%</b>	<b>Keterbatasan kegiatan yang diakibatkan dari Pandemi covid-19</b>		
				a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	100%			
				1) Sub kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	11 Kegiatan	11 Kegiatan			
				2) Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	4 Kegiatan	4 Kegiatan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					
17	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		<b>1. Program Pembinaan Perpustakaan</b>					
				<b>Persentase perumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan.</b>	<b>30 %</b>	<b>-79,22 %</b>			
				<b>Persentase perpustakaan yang aktif</b>	<b>35,08 %</b>	<b>39,46 %</b>			
				a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,42%			
				1) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan internet/hotspot, terbitan berkala, 12 bulan	Layanan internet/hotspot, terbitan berkala, 12 bulan			
				2) Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Layanan Perpustakaan Keliling 176 titik	Layanan Perpustakaan Keliling 233 titik			
				3) Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	Pengadaan e-book 1 paket	Pengadaan e-book 1 paket			
				4) Kegiatan Pengelolaaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	12 bulan	12 bulan			
				5) Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	40 perpustakaan	30 perpustakaan			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				6) Sub Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				7) Sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Sosial	Kegiatan Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten	Kegiatan Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI Tingkat Kabupaten			
					Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten	Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten			
					Kegiatan Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI Tingkat Provinsi	Kegiatan Lomba Bercerita bagi Siswa SD/MI Tingkat Provinsi			
					Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi	Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi			
					Kegiatan Lomba Perpustakaan Umum	Kegiatan Lomba Perpustakaan Umum			
					Kegiatan Lomba Perpustakaan Sekolah	Kegiatan Lomba Perpustakaan Sekolah			
					Kegiatan Lomba Artikel	Kegiatan Lomba Artikel			
					Kegiatan Lomba Pustakawan Berprestasi	Kegiatan Lomba Pustakawan Berprestasi			
					Kegiatan Mendongeng Anak Temanggung	Kegiatan Mendongeng Anak Temanggung			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip		<b>1. Program Pengelolaan Arsip</b>					
				<b>Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku</b>	26,16 %	32,55 %			
				<b>Persentase arsip konvensional yang dialih mediakan</b>	30 %	30 %			
				a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	3.000 dokumen	3.032 dokumen			
				2) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	8 Kegiatan	8 Kegiatan			
				b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	12 bulan	12 bulan			
				c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100%	100%			
1) Sub Kegiatan Pemberdayaan kapasitas unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	6 kegiatan	6 kegiatan							



No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>					
				a. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung/dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100%	100%			
				1) Sub Kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah			

### 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pelaksanaan urusan pilihan di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3  
Pelaksanaan Urusan Pilihan

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		<b>1. Program Pengelolaan Tangkap Ikan</b>					
				<b>Prosentase Nelayan perairan umum yang terbina.</b>	10	12,48			
				a) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	12 bulan	12 bulan			
				<b>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>10</b>	<b>12,48</b>			
				<b>Produktivitas Ikan Nila</b>	4.7	6,80			
				<b>Produktivitas ikan Lele</b>	11,5	10.33			
				<b>Produktivitas Ikan Mas</b>	5.7	6,77			
a) Pengembangan Pembudidaya ikan kecil	100%	100%							

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pengembangan kapasitas Pembudidaya ikan kecil.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				b) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100%	100%			
				1) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			Perlu dilakukan kajian terhadap fungsi dan potensi lain BBI jawaban : 1. Sesuai dengan Perda 24 Tahun 2020 UPTD BBI sudah hilang dan fungsinya ditarik ke seksi produksi perikanan, tetapi fungsi BBI sebagai penyedia kebutuhan benih ikan dengan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>kuantitas dan kualitas yang memenuhi syarat budidaya serta untuk pengendalian mutu benih, tetap dilaksanakan sehingga masyarakat tetap mendapatkan benih ikan sesuai dengan standart budidaya.</p> <p>2. Guna pengoptimalan potensi BBI telah dilaksanakan rehab kolam (sehingga kolam tidak bocor dari anggaran DAK Bid Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp.315.730.322,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp</p>

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>173.750.000), serta rehab kolam berupa penyekatan dan betonisasi dasar kolam K11, menjadi 3 kolam berupa 2 kolam induk (jantan dan betina) dan 1 kolam pendederan, bertujuan untuk efisiensi fungsi kolam dan mempermudah pengelolaan, serta rehab saluran air/parit yang bocor. (DAK Perikanan 2021).</p> <p>3. Guna meningkatkan mutu dan kualitas benih ikan maka manajemen pemeliharaan ikan harus dengan pedoman</p>

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). 4. Dengan perbaikan sarana dan prasarana diharapkan potensi benih yang dihasilkan dalam setahun (preproduksi sekarang 150.000 ekor ) dapat mencapai 393.750 ekor.
				3) Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat.	12 bulan	12 bulan			
				<b>3. Program Pengolahan dan Permasalahan Hasil Perikanan</b>					
				<b>Persentase tersedianya data dan informasi produksi olahan hasil perikanan.</b>	100	100			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	100 %	100 %			
				1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			
				b) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %			
				1) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 kegiatan	1 kegiatan			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP)		1. Program Penyedia dan Pengembangan Sarana Pertanian					
				Produktivitas padi	63	59,0			
				Produktivitas jagung	45,85	45			
				Produktivitas Ubi Kayu	339,6	329,12			
				Produktivitas bawang putih	79,35	65,09			
				Produktivitas bawang merah	79,95	71,40			
				Produktivitas cabai rawit	54,85	69,87			
				Produktivitas cabai besar	69,35	70,57			
				Produktivitas tembakau	6,7	6,879999978			
				Produktivitas kopi robusta	7,1	71,5			
				Produktivitas kopi arabika	6,8	6,11			
				Produktifitas Cengkeh	2,25	2,32			
				Produktivitas Vanili	2,9	2,93			
				Produktivitas ternak sapi	177,2	177,2			
				Produktivitas ternak domba	13,69	13,69			
				Produktivitas ternak kambing.	13,69	13,69			
				Produktivitas ternak ayam ras pedaging.	0,75	0,75			
				Produktivitas ternak ayam ras petelur.	10,88	10,26			



N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Produktivitas ternak ayam buras.</b>	0,7	0,7			
				a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100 %	100 %			
				1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.	100%	100%			
				1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	12 bulan	12 bulan			

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>2. Program penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>					
				<b>Persentase kecukupan sarana alat mesin pertanian pangan utama.</b>	76,45	76,64			
				a) Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%			
				1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				b) Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.	4 lokasi	4 lokasi			
				2) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.	50 lokasi	50 lokasi			
				3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit.	4 lokasi	4 lokasi			
				4) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	20 lokasi	20 lokasi			
				5) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 lokasi	1 lokasi			
				<b>3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner</b>					
				<b>Persentase penanganan penyakit hewan.</b>	85	96,68			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat.</b>	65	82,96			
				a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	100%	100%			
				1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.	12 bulan	12 bulan			
				b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				<b>4. Program Penyuluhan Pertanian</b>					
				<b>Persentase pengendalian bencana pertanian.</b>	40,2	32,81			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				2) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				<b>5. Program Penyuluhan Pertanian</b>					
				<b>Persentase kelompok tani yang naik kelas.</b>	0,78	0,81			
				a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%			
				1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.	1 kegiatan	1 kegiatan			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	1 kegiatan	1 kegiatan			
				b) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	100%			
				1) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 kegiatan	1 kegiatan			
<b>3</b>	<b>Pariwisata</b>	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata		<b>1. Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata</b>					
				<b>Persentase obyekwisata yang berkembang.</b>	33,33	31,25	Adanya pembatasan kegiatan pariwisata yang di sebabkan Pandemi Covid-19.	Menunggu pandemi berakhir dan berinovasi.	
				a) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota.	1 keg	1 keg			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	1 keg	1 keg			
				3) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota.	12 bulan	12 bulan			
				4) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.	12 bulan	12 bulan			
				<b>2. Program Pemasaran Pariwisata</b>					
				<b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan.</b>	19,00	-0,86	Adanya pembatasan kegiatan pariwisata yang di sebabkan Pandemi Covid-19.		
				a) Pemasaran Pariwisata danam Luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan srtategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.	12 bulan	12 bulan			
				2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan			
				<b>3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</b>					
				<b>Persentase Peningkatan Desa Wisata.</b>	7,51	92,14	-	-	
				<b>Persentase desa wisata naik klasifikasi.</b>	7,51	0	Belum adanya Standar yang pasti dan legal mengenai Klasifikasi Desa wisata	Pembuatan Perbup tentang Desa Wisata.	
				<b>Persentase Peningkatan Jumlah pelaku Ekraft.</b>	7,51	0	Keterbatasan kegiatan yang diakibatkan dari Pandemi covid 19	-	
				a) Pengembangan Pariwisata	100%	100%			



N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	11 Kegiatan	11 Kegiatan			
				2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
4	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Perdagangan	Dinkopdag		1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
			Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar		53,75	36,956			Pembuatan aplikasi E-Retribusi selesai tanggal 31 Desember 2021 dan Pengadaan 10 unit Mpos selesai tanggal 6 Desember 2021.

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.						
				<b>Persentase pasar daerah dalam kon disi baik.</b>	50%				
				<b>Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang.</b>	50 %				
				<b>Persentase realisasi penerimaan pendapatan Pasar.</b>	85%				
				<b>Persentase pedagang kakilima yang menempati ruangesuai peruntukan</b>	30 %				
				a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.	100%	97%			
				1) Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.	2190	2160			
				b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.	100%	100%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.	216	174			
				<b>2. Program Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan Parang Penting</b>					
			Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.						
				<b>Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi.</b>	68,42	51,51			

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				a) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.	100%	98 %			
				2) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	45	35			
				b) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	90 %			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.	28	21			
				<b>3. Program Pengembangan Ekspor</b>					
				<b>Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sector perdagangan.</b>	2,21	19,27			
				a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	85 %			
				1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	100	85			
				<b>4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>					

N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.						
				<b>Prosentase tera atau teraulang pada alat ukur takartimbang yang terdaftar.</b>	85	100			
				a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.	100%	100%			
				1) Pelaksanaan Metrologi Legal, BerupaTera, Tera Ulang.	100	100			
				<b>5. Program Pengembangan Ekspor</b>					
				<b>Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sector perdagangan.</b>	2,21	19,27			
				a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi	100%	85%			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.					
				1) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	100	85			
7	Perindustrian	Dinperinaker		<b>1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri</b>					
				<b>Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah.</b>	-				
				a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	100%			
				1) Koord inasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

N o.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
				<b>2. Program Pengenalan Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</b>					
				<b>Persentase pembinaan industri penghasil cukai.</b>	100%	100%			
				a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
				1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan					



N o.	URUSAN PEMERINTAH AN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASLAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
8	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2. Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis daerah tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah Pemulihan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pariwisata, sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pengurangan kemiskinan. Kebijakan strategis ditetapkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4  
Kebijakan Strategis Daerah dalam rangka Penyelesaian Masalah Daerah  
Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Penyederhanaan prosedur birokrasi dalam pengurusan perizinan dan non perizinan di Daerah	Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung	Memudahkan Masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah
2.	Penyusunan Pedoman Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan arah dan pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan dan belanja dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2022.</li><li>2. Mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tertib administrasi</li></ol>
3.	Perbup Desa Wisata	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Desa Wisata di Kabupaten Temanggung	Syarat dan Ketentuan pembuatan Desa Wisata dan memberikan arah/pedoman desa wisata sebagai upaya percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
4.	Penetapan Darurat bencana banjir dan longsor	Keputusan Bupati Nomor 360/380 Tahun 2021 tentang Status Darurat Bencana, Angin, Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Temanggung	Percepatan Penanganan Bencana Banjir dan Longsor
5.	Percepatan Penanganan Covid-19	SE Sekda Kabupaten Temanggung Tentang Pelaksanaan WFH dan WFO di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pelaksanaan WFH dan WFO di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
		Instruksi Bupati Temanggung Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung	PPKM Darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung
		Surat Sekretaris Daerah Perihal Vaksinasi	Vaksinasi
6.	Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyelenggaraan perpustakaan di daerah secara berkualitas, berintegrasi dan berkesinambungan	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan perpustakaan di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan di daerah, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.
7.	Penerimaan peserta didik baru	Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	Landasan dan pengendalian atas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru agar lebih transparan dan akuntabel
8.	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini	Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SPM pada Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar	Untuk meningkatkan capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan meletakkan dasar bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar
9.	Penyusunan pelaksanaan sewa los, kios dan pertokoan Pasar Daerah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sewa Los, Kios Dan Pertokoan Pasar Daerah di Kabupaten Temanggung tertanggal 30 Desember 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ketentuan tarif sewa</li> <li>2. jangka waktu sewa</li> <li>3. tata cara pelaksanaan sewa</li> <li>4. pembayaran sewa</li> <li>5. larangan dan sanksi</li> <li>6. pengakhiran sewa</li> <li>7. ketentuan peralihan</li> </ol>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
10.	Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021	Landasan, arah, dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
11.	Penyusunan Renstra PD	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi PD Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 serta sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja PD yang mengarah pada pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU).
12.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020	Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020  Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020	Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Temanggung atas pengelolaan keuangan daerah.
13.	Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca Awal Tahun 2021	Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Neraca Awal Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 Dan Neraca Awal Perangkat Daerah Per 1 Januari 2021	Penyusunan Neraca Awal Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 karena SOTK baru

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
14.	Penyelenggaraan Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembimbingan dan Konsultasi Pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tanggal 24 Mei 2021	Untuk meningkatkan kepatuhan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa
15.	Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tanggal 6 Mei 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memberikan pedoman dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di Kabupaten Temanggung;</li> <li>2. Untuk meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi;</li> <li>3. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani;</li> <li>4. Membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;</li> <li>5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Daerah</li> </ol>
16.	Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021	Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 700/12 Tahun 2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih,transparan dan akuntabel;</li> <li>2. agar pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan baik, berdayaguna dan berhasil guna</li> </ol>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
17.	Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	Peraturan Bupati Temanggung Nomor 112 Tahun 2021 Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2021	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan;
18.	Pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peraturan dan dokumen yang mendukung pola karier bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.</li> <li>• Adanya keserasian dan keterkaitan antara pendidikan, pangkat, jabatan, pengabdian, prestasi kerja, sehingga pengembangan dan pembinaan karier PNS dapat terencana, terarah, dan berkesinambungan.</li> <li>• Menjamin pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang selaras dan seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi.</li> </ul>
19.	Pelaksanaan Sistem Merit dalam mewujudkan strategi pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang transparan, objektif dan akuntabel	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peraturan dan kebijakan tentang manajemen talenta dan rencana suksesi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.</li> <li>• Terbentuknya Pegawai Negeri Sipil yang profesional yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja optimal untuk mengisi Jabatan</li> </ul>

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan PNS yang professional.</li> <li>• Pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan terukur melalui Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi.</li> </ul>
20.	Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	Memberikan kejelasan dalam melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung secara terbuka dan kompetitif.
21.	Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakan Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan di lingkungan kerja masing-masing.</li> <li>• melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q BKPSDM setiap 3 (tiga) bulan</li> </ul>
22.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Mengatur pemberian delegasi wewenang dan kuasa sebagian wewenang Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan dan menandatangani surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
23.	Pembinaan dan pengembangan karier bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyesuaian Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Sebagai pedoman teknis tentang Penyesuaian Kelas Jabatan bagi Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung



### 3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN 2020

Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Temanggung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5  
TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2020

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>						
1.	Pendidikan	DINDIKPORA	Pembelajaran pendidikan SD/SMP terkendala dengan adanya Pandemi Covid. Perencanaan pembelajaran tatap muka yang telah disusun oleh Dinas tidak dapat dilaksanakan	Agar sebagian anggaran refocusing dialokasikan untuk persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga telah membuat Surat Edaran Nomor 420/3445 Tahun 2021 tanggal 3 September 2021 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Pelajaran 2021/2022 pada Satuan Pendidikan dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Temanggung.</li> <li>2. Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melaksanakan Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal 6 September 2021</li> <li>2. Peningkatan kualitas/mutu pendidikan.</li> </ol>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tatap Muka telah menerima vaksin minimal Dosis 1 pada tanggal 6 September 2021.</p> <p>3. Sebelum pembelajaran tatap muka di laksanakan, Dindikpora telah melakukan pendataan kesiapan di masing-masing satuan pendidikan dalam persiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka, antara lain;terkait sarana dan prasarana, serta vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan).</p> <p>4. Dalam rangka persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, Dindikpora mendapat bantuan masker dari BPBD untuk semua satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung dan telah dibagikan.</p> <p>5. Berkaitan dengan anggaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar telah tersedia di masing- masing satuan pendidikan. Persiapan teknis PTM diserahkan kepada satuan pendidikan.</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Pembelajaran sistem daring ternyata tidak efektif bahkan cenderung memberatkan orang tua yang tidak semuanya bisa membantu kegiatan belajar mengajar di rumah. Hal ini berdampak pada perilaku peserta didik yang mengabaikan tugas pokok belajar, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya generasi unggul.</p>	<p>- Pemerintah Daerah merumuskan kembali model pembelajaran daring yang menyenangkan dan sesuai dengan kondisi Daerah dengan tidak melanggar regulasi.</p>	<p>Berkaitan dengan model pembelajaran, diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing satuan pendidikan dengan tetap dilaksanakan Monev oleh DINDIKPORA. Pada Tahun 2021 ini, model pembelajaran daring sudah tidak monoton seperti hanya membagi video melalui youtube. Ada inovasi model pembelajaran melalui <i>zoom meeting</i>, <i>google meet</i>, dan lain sebagainya agar pembelajaran secara daring bisa berjalan secara 2 (dua) arah.</p> <p>Mulai tanggal 6 September 2021, satuan pendidikan di lingkungan Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.</p> <p>Pemerintah Pusat sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan kuota untuk masing-masing siswa, PAUD sebesar 7 GB, SD sebesar 10 GB, SMP sebesar 15 GB setiap bulannya.</p>	<p>Mengurangi beban orang tua dalam membantu siswa memahami pelajaran dan mengurangi kebosanan siswa dalam mengikuti pelajaran secara daring.</p>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya siswa dan guru agar dapat mengakses media daring dengan mudah.</li> </ul>	Pemerintah Pusat sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan kuota untuk masing-masing siswa, PAUD sebesar 7 GB, SD sebesar 10 GB, SMP sebesar 15 GB setiap bulannya.	Akses internet di beberapa wilayah yang kesulitan mendapatkan jaringan selular
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyederhanakan kurikulum pembelajaran daring menjadi kurikulum yang adaptif.</li> </ul>	Kurikulum pembelajaran berasal dari Kementerian Pendidikan, namun DINDIKPORA selalu berusaha mendorong satuan pendidikan agar selalu menciptakan inovasi dalam metode pembelajaran.	Metode pembelajaran yang efektif
			Kekurangan tenaga guru pada satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) masih belum bisa terpenuhi pada tahun 2020 (rekomendasi LKPJ Tahun 2019).	Pemerintah Daerah agar mengusulkan tambahan formasi guru pada penerimaan CPNS dan sekaligus mengawal proses penetapan kuota formasi untuk guru SD dan SMP.	Bahwa berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, tidak ada formasi guru pada CPNS Tahun 2021 ini, namun Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membuka formasi guru dengan status PPPK sejumlah 2.084 (dua ribu delapan puluh empat) untuk Guru SD dan SMP. sampai dengan akhir desember telah terisi 1003 formasi untuk tahap pertama.	Kebutuhan tenaga pendidik di SD dan SMP

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
2.	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Bidan Desa semakin berkurang di tahun 2020 dikarenakan banyaknya Bidan Puskesmas yang pensiun sehingga Bidan Desa ditarik ke Puskesmas.	Pemerintah Daerah agar memenuhi kebutuhan Bidan Desa dan Puskesmas.	Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan perekrutan formasi CPNS tahun 2021 yang terdiri dari 120 (seratus dua puluh) Bidan Terampil (D-III Kebidanan) untuk 25 (dua puluh lima) Puskemas. Diharapkan penambahan tersebut dapat mengisi kekosongan Bidan Desa.	Terpenuhinya kebutuhan Bidan desa dan Bidan Puskesmas
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR	Akibat refocusing anggaran, utamanya terkait dengan pemeliharaan jalan dan irigasi, maka banyak kerusakan jalan dan irigasi yang tidak bisa tertangani (persentase kerusakan semakin bertambah).	Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan irigasi agar tidak direfocusing kembali sekaligus mencari sumber anggaran lain baik dari Pemerintah maupun pemerintah Provinsi.	<p>1. Pada Tahun 2021 Anggaran untuk pemeliharaan jalan kabupaten adalah sebesar Rp.70.222.811.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anggaran yang dari DAK sebesar Rp.10.129.148.000,00</li> <li>- anggaran dari Bankeu Provinsi sebesar Rp.37.650.000.000,00,</li> <li>- anggaran dari DAU sebesar Rp.22.380.663.000,00.</li> </ul> <p>2. Pada Tahun 2021 anggaran untuk pemeliharaan irigasi kabupaten adalah sebesar</p>	1. Meningkatkan infrastruktur jalan, irigasi dan drainase serta sektor kePUan lainnya

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Rp.13.140.080.000 dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- anggaran yang berasal dari DAK sebesar Rp.10.734.300.000,00</li> <li>- anggaran dari DAU sebesar Rp.2.405.780.000,00.</li> </ul> <p>3. Pada APBD Tahun 2022 telah dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan, peningkatan jalan, irigasi, dan drainase serta sektor kePUan lainnya sebesar Rp.41.429.669.717,00. Sebanyak Rp.39.800.000.000 untuk penanganan jalan, irigasi dan drainase sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. Untuk kegiatan peningkatan infrastruktur dari sumber dana Bankeu Provinsi di tahun 2022 sebesar Rp.12.200.000.000,00</p> <p>4. Pada awal Tahun 2021, DPUPR telah mengajukan proposal Bankeu Provinsi untuk anggaran jalan, irigasi.</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Sesuai surat dari BPKPAD perihal Data Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 rancangan alokasi bantuan keuangan bidang jalan dan jembatan senilai Rp.10.700.000.000,00 untuk 3 lokasi, sedangkan usulan bankeu bidang irigasi sebesar Rp.1.500.000.000,00 untuk 2 lokasi.</p> <p>Anggaran kegiatan yang bersumber dari DAK yang telah disetujui adalah untuk kegiatan bidang jalan sebesar Rp.5.400.000.000,00.</p>	
			<p>Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Temanggung Tahun 2019 terkait dengan banyaknya drainase baik di Pedesaan maupun di Perkotaan yang memerlukan penataan dan perbaikan masih belum ditindaklanjuti karena anggarannya terkena refocusing.</p>	<p>Agar Rekomendasi DPRD Tahun 2019 segera ditindaklanjuti.</p>	<p>1. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan drainase sebesar Rp.250.000.000,00, untuk pembangunan drainase jalan Satker Jalan Nasional melalui kegiatan APBN Preservasi Jalan Bts. Kab. Banjarnegara - Wonosobo - Temanggung – Secang</p>	-

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sepanjang 5,9 km. Sedangkan melalui kegiatan KOTAKU pekerjaan saluran drainase lingkungan dilaksanakan sepanjang 3.268,6 m' di 5 lokasi yang mendapatkan program KOTAKU.</p> <p>2. Anggaran untuk drainase telah meningkat dibandingkan tahun 2020</p> <p>3. Untuk tahun 2022 telah dialokasikan pada APBD untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan drainase jalan Temanggung-Gilingsari sebesar Rp.334.285.000,00.</li> <li>- Rehabilitasi sebagian cross drain dan saluran drainase Jl. Sundoro sebesar Rp.634.457.000,00.</li> </ul> <p>4. Di tahun 2022 juga telah dianggarkan sebesar Rp.334.107.700,00 pada sub kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem drainase.</p>	



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
			Masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap Perda Tata Ruang utamanya lahan LP2B dan LCP2B.	Pemerintah Daerah harus tegas dalam penegakan Perda Tata Ruang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian alih fungsi lahan LP2B 100% tidak diizinkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>DPUPR telah mengeluarkan KRK sejumlah 6 (enam) dan ITR sejumlah 36 (tiga puluh enam) yang pola ruangnya LP2B dengan isi Ketentuan Umum Peruntukan Zonasi (KUPZ): diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.</li> <li>Pengendalian alih fungsi juga dilakukan melalui rapat melalui rapat tim pengendalian alih fungsi yang ada di DPM dan Dinpermades.</li> </ul> </li> <li>Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPUPR telah memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar tata ruang sejumlah 6 (enam) kali dengan tembusan disampaikan kepada TIM TKPRD terkait (Bupati, DPM, Satpol PP dan Damkar, Camat, Kepala Desa/Lurah).</li> </ol>	<p><b>TUJUAN:</b> Menegakkan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031</p> <p><b>MASALAH YANG DISELESAIKAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengendalian alih fungsi lahan LP2B 100% tidak diizinkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah diberikan informasi ke pemohon terkait Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) LP2B hanya untuk budidaya tanaman pangan</li> <li>Telah dilakukan rapat alih fungsi yang hasilnya tidak diperkenankan alihfungsi LP2B</li> </ul> </li> </ol>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>3. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 650/000400/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Kesesuaian Tata Ruang Dalam Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Kabupaten Temanggung yang dikirimkan kepada para Kepala Desa.</p> <p>4. Telah melakukan rapat pembahasan sinkronisasi data lahan baku sawah di DKPPP pada tanggal 24 Maret 2021 yang dihadiri oleh DPUPR, BPS, Kantor ATR/BPN, DKPPP, dan Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Temanggung.</p> <p>5. Akan melakukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 dan setelah proses revisi Perda tersebut selesai akan ditindaklanjuti</p>	<p>2. Informasi pelanggaran tata ruang sudah tersampaikan kepada pelaku yang melanggar</p> <p>3. Pemerintah desa telah disosialisasikan prosedur alih fungsi tanah kas desa</p> <p>4. Telah terjadi kesepahaman lahan baku sawah pada perangkat daerah terkait</p> <p>5. Revisi Perda No 1 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 masih dalam proses</p> <p>6. TKPRD sudah melakukan koordinasi rutin salah satunya membahas</p>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan Surat Edaran Bupati Temanggung tentang Kesesuaian Tata Ruang dan Perizinan yang dimiliki oleh industry Eksisting di luar KPI.</p> <p>6. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) rutin melaksanakan rapat koordinasi, antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 Maret 2021 Koordinasi Penyiapan Database RDTR di Smart Office Kab. Temanggung;</li> <li>- 1 April 2021 Rapat zoom meeting dengan kementerian ATR/BPN terkait muatan Revisi RTRW;</li> <li>- 31 Mei 2021 Rapat Pelaksanaan Pembaharuan Aplikasi Sim Taru di Smart Office DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 29 Juli 2021 Rapat koordinasi mengenai jaringan telekomunikasi dan rancangan RDTR di</li> </ul>	<p>Penegakan Perda No 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031</p>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Smart Office DPUPR Kab. Temanggung;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 Agustus Rapat laporan pendahuluan penyusunan SIMTARU di Smart Office DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 2 September 2021 Rapat Koordinasi Kebutuhan Data Kegiatan SIMTARU di Smart Office DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 14 Oktober 2021 Rapat Pembahasan antara laporan kegiatan SIMTARU di Ruang Sigandul DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 14 Oktober 2021 Rencana pelaksanaan KKPR di Ruang Sekda Kabupaten Temanggung;</li> <li>- 19 Oktober 2021 Pembahasan Percepatan Penyusunan Dokumen RDTR Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut MCPKPK;</li> </ul>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>- 21 Oktober 2021 Teknis Rencana Pelaksanaan KKPR di Smart Office DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 27 Oktober 2021 Persiapan Validasi KLHS di Sigandul DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 4 November 2021 Pembahasan Fakta dan Analisa RDTR KSECT Kabupaten Temanggung di Ruang Sigandul DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 9 November 2021 Laporan Buku Rencana RDTR di Smart Office DPUPR Kab. Temanggung;</li> <li>- 11 November 2021 pembahasan Draf Raperbup dan Lampiran RDTR KSECT;</li> <li>- 16 November Rapat Pembahasan laporan Akhir SIMTARU;</li> <li>- 19 November 2021 Rapat Tahapan Penetapan Rancangan Perbup RDTR</li> </ul>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					di Smart Office DPUPR Kab. Temanggung; - 24 November 2021 Konsultasi Publik Pembahasan Raperbup RDTR di Loka Bakti Praja Kab. Temanggung.	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRKPLH	<p>Proses penyerahan pengelolaan Rusunawa dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah belum selesai, sehingga Pemerintah Daerah belum dapat mengelola sebagaimana mestinya.</p>	<p>Pemerintah Daerah agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.</p>	<p>DPRKPLH telah berkoordinasi dengan Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (P2W) untuk Penyerahan Rusunawa Kranggan Temanggung. Pengelolaan aset rusunawa telah diselesaikan pada Tahun 2021 dengan ditandatanganinya berita acara serah terima 3 Rusunawa di Kabupaten Temanggung, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rusunawa Kranggan</li> <li>2. Rusunawa Parakan Wetan</li> <li>3. Rusunawa Manggong</li> </ol>	<p>Kepastian kepemilikan aset daerah atas Rusunawa</p>
			<p>Masih ditemukan adanya kawasan kumuh di daerah perkotaan terutama di Kota Temanggung dan Parakan</p>	<p>Perlu upaya intensif dan inovatif dari Pemerintah Daerah, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah</p>	<p>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH menyiapkan usulan program/kegiatan (didukung oleh Askot dan Fasilitator KOTAKU).</p>	<p>1. Mengurangi luasan Kawasan kumuh dan pada Tahun 2021 berkurang seluas 38,314 Ha menjadi 138,522 Ha;</p>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH telah menyusun DED Kawasan BHUMI PALA (meliputi Kelurahan Kertosari, Kowangan dan Madureso Kecamatan Temanggung) dan Kawasan TIRTO AGRO (Desa Mudal dan Kelurahan Mungseng Kecamatan Temanggung).</p> <p>3. Pada tahun 2021, dianggarkan dari Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Kotaku @Rp. 1.000.000.000 untuk Kelurahan Parakan Kauman, Parakan Wetan, Walitelon Utara, Nampirejo, dan Glapansari.</p>	<p>2. Kegiatan KOTAKU di 5 (lima) Kawasan telah menurunkan luasan kawasan kumuh seluas 13,254 Ha dan terdapat 3 (tiga) lokasi/ kawasan kumuh tidak ada lagi yaitu di Kelurahan Walitelon Utara, Desa Nampirejo, dan Glapansari.</p>
			Adanya anomali pada jumlah RTLH di wilayah Kabupaten Temanggung dari tahun ke tahun. setiap tahun jumlah RTLH semakin bertambah padahal setiap tahun sudah tersedia anggaran dan sudah terealisasi. Hal ini	Pemerintah Daerah perlu verifikasi data faktual dari DTKS khusus untuk RTLH termasuk mendata ulang terhadap RTLH yang belum masuk DTKS.	Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH telah melakukan input dan verifikasi DTKS secara reguler dan telah melakukan penguatan legalitas data yang terverifikasi..	Terpenuhinya Data DTKS dan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetap diperhatikan dalam penanganan/ pengurangan RTLH yang valid.

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
			disebabkan diantaranya oleh sasaran RTLH yang tidak tepat karena Pemerintah Daerah tidak mempunyai data khusus terkait Rumah Tangga Miskin yang berhak menjadi penerima manfaat.			
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	SATPOL PP	Penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) belum dapat tertangani utamanya di daerah perkotaan dan sekitar pasar daerah	Perlu di intensifkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui SATPOL PP dan Damkar selalu melaksanakan operasi rutin guna penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. SATPOL PP dan Damkar juga melaksanakan operasi gabungan bersama Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinhub dan Dinperindag.</li> <li>2. SATPOL PP dan Damkar juga melaksanakan pembinaan terhadap PKL pelanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan PKL yang ada di wilayah Alun-alun Temanggung sudah tertata dengan baik dikarenakan Alun-alun harus bersih dari PKL serta setiap hari Anggota Satpol PP selalu bertugas di lokasi untuk antisipasi PKL susulan / PKL yang menggunakan roda 2 maupun roda 4</li> <li>2. Bilamana ada PKL yang datang kembali, kami imbau untuk saling menghargai tugas kami sebagai penegak Perda tentang PKL</li> </ol>



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>3. SATPOL PP dan Damkar bersama Dinas Perhubungan dan Dinperindag melakukan penataan PKL.</li> <li>4. Meningkatkan kapasitas SATPOL PP dengan adanya Gerakan Temanggung Tertib sesuai kebijakan Bupati Temanggung.</li> <li>5. SATPOL PP dan Damkar telah memiliki media dashboard dalam rangka monitoring penegakan Peraturan Daerah sebagai pendukung Gerakan Temanggung Tertib.</li> </ul>	<p>3. Dalam pelaksanaan Operasi Gabungan penataan PKL dan K4 Satpol PP selalu berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait</p>
			<p>Penataan dan penertiban terkendala masalah koordinasi lintas Perangkat Daerah (saling lempar tanggung jawab).</p>	<p>Peraturan Bupati tentang Temanggung tertib segera diterbitkan sehingga masalah klasik miskoordinasi antar Perangkat Daerah terkait bisa terselesaikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui SATPOL PP dan Damkar bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait telah menyusun Draft Peraturan Bupati tentang Penertiban PKL dan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (K4) dan sampai dengan saat ini Draft Peraturan Bupati tersebut masih berproses.</li> </ul>	<p>Telah disusun draft Perbup Penetapan zona PK di Kabupaten Temanggung</p>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					2. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui SATPOL PP dan Damkar berkerja sama dengan Dinperindag, Dinas Perhubungan, dan Kecamatan dalam penertiban PKL dan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (K4) di wilayah masing-masing.	
<b>II. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>						
1.	Tenaga Kerja	DINPERINAKER	Masih banyak perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan UMK.	Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan dan penindakan bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pemberian upah minimum.	1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DINPERINAKER telah melaksanakan sosialisasi penerapan UMK Tahun 2022 pada tanggal 13 Desember 2021 bersama Satuan Pengawas Ketenagakerjaan Kab. Magelang dan keikutsertaan dalam BPJS ketenagakerjaan yang diikuti oleh 40 (empat puluh) perusahaan skala menengah dan besar se-Kabupaten Temanggung.	Upah yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan UMK

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					2. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DINPERINAKER telah menyiapkan hotline pengaduan masyarakat tentang ketenagakerjaan guna percepatan pelayanan masyarakat dalam penyelesaian pengaduan, namun putus kontrak dengan pihak penyedia layanan aplikasi pusat data informasi dan pelayanan ketenagakerjaan karena hasil tidak sesuai dengan KAK dan sudah melebihi batas waktu.	
2.	Lingkungan Hidup	DPRKPLH	Dengan munculnya TPSD justru menambah volume sampah di TPA.	Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi untuk penanganan sampah di tingkat TPSD sehingga tidak semua sampah diangkut di TPA.	Bupati Temanggung telah membuat Surat Edaran Nomor 60.1/002 tanggal 22 Februari 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa Kabupaten Temanggung, yang mengatur sampah yang terkirim ke TPA adalah hanya sampah Residu. DPRKPLH bekerja sama dengan Dewan Persampahan,	Pengelolaan sampah di tingkat TPSD semakin baik sehingga dapat mengurangi volume timbunan sampah di TPA.

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					Fasilitator Persampahan Tingkat di Kecamatan (FPK) dan Fasilitator Persampahan di Tingkat Desa/Kelurahan (FPD/Kel) melaksanakan evaluasi sistem pengelolaan sampah desa sesuai dengan SE Bupati untuk setiap desa atau kelurahan pada tanggal 8 s.d 23 Desember 2021.	
			Pengangkutan sampah yang jauh dari TPA tidak efektif dan efisien (menghabiskan waktu dan biaya).	Segera mewujudkan TPA Temanggung Utara.	1. Pemerintah Kabupaten Temanggung berencana akan melakukan pinjam pakai tanah aset Provinsi Jawa Tengah yang berada di Desa Mento Kec. Candirotro untuk digunakan sebagai TPA. Akan tetapi, aset tanah milik provinsi Jateng yang ada di Mento, sampai dengan saat ini masih digunakan oleh SMKN 1 Temanggung sebagai kebun praktikum dan digunakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai lahan perkebunan kopi, sehingga kecil	Penanganan sampah yang efektif dan efisien

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kemungkinan dipinjam pakai utk lahan TPA Temanggung Utara.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya memaksimalkan TPS desa sehingga pengelolaan sampah di masing2 Desa lebih Optimal dan yang dibawa keluar dari Desa benar2 hanya sampah residu. Untuk Desa yang tidak bisa menyediakan lahan untuk TPS Desa, Pemerintah Kabupaten Temanggung berupaya membangun TPS skala kecamatan (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu atau Pusat Daur Ulang ) melalui anggaran APBN bekerjasama dg desa yang masih mempunyai lahan minimal 1.000 m<sup>2</sup></p>	
			Lahan kritis di lereng Sindoro Sumbing dan Perahu semakin meluas	Mou antara Pemerintah daerah dan Perhutani segera dilaksanakan (dilakukan penutupan lahan milik perhutani untuk tanaman	Telah dilaksanakan kesepakatan tidak melaksanakan penanaman jenis tanaman semusim di lahan Perhutani kawasan Kecamatan Bansari dan akan dilaksanakan	Mengurangi Lahan kritis di lereng Sindoro,Sumbing dan Perahu

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
				musiman secara bertahap) termasuk didalamnya menindak tegas praktik jual beli lahan perpetak.	secara bertahap di kawasan Perhutani yang lain dan Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan MOU dengan Perhutani mulai Tahun 2020	
			Sumber mata air di wilayah Kabupaten Temanggung semakin mengecil/sedikit	Meng-intensifkan penghijauan lereng Sindoro Sumbing dan Perahu dilahan milik masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 522.54/003 Tahun 2021 tentang Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan ke seluruh desa.</li> <li>2. Pada Tahun 2021 dilaksanakan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan penghijauan melalui Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan yang difasilitasi penyediaan bibit oleh Ormas (GP Ansor dan Pemuda Muhammadiyah) dengan jumlah 110.000 bibit</li> </ol>	Intensifikasi penghijauan lereng Sindoro Sumbing

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan total Aren 70.000, bambu 120.000, beringin 30.000. pelaksanaan penanaman sudah dimulai pada bulan November 2021.</p> <p>3. Bibit tanaman tersebut akan digunakan untuk melaksanakan Gerakan Konservasi Tanah Dan Air Berkelanjutan di Kabupaten Temanggung pada Zona Kritis Kabupaten yang telah dilakukan pemetaan lokasinya.</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah mengajukan permohonan bantuan bibit tanaman konservasi kepada KLHK, PT. Pertamina, PT. PLN, PT. Aneka Tambang, PT. Gudang Garam, PT. Djarum Foundation, PT. Sampoerna, dan Putra Sampoerna Foundation.</p> <p>Bibit dari CSR yang sudah masuk:  PT. Djarum 6.000 bibit  PT. KAI 18.000 bibit</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Jamkrida 900 bibit            Geodhipa 4.500 bibit PT.            Pusri 18.000 bibit            BP.DAS berkomitmen untuk mengirimkan 100.000 bibit</p> <p>5. Pada Tahun 2021 Desa melaksanakan gerakan konservasi pada zona kritis desa dan wilayah kewenangan desa. Beberapa desa telah menganggarkan untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan (Konservasi) melalui APBDesa dengan total Rp. 2.813.138.900.</p>	
			Masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah.	Perlu tindakan tegas Pemerintah Daerah terhadap Perusahaan yang melanggar	1. Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun belum melakukan sosialisasi Perda tersebut karena ada perubahan perundangan di atasnya. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Kabupaten	Tertib pengelolaan limbah oleh perusahaan sesuai dengan standar



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Temanggung telah melakukan sosialisasi PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen LHK sebagai turunan PP tersebut.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan monitoring evaluasi, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu tidak ada lagi pembinaan akan tetapi langsung kepada pengawasan. Jika terjadi pelanggaran akan dikeluarkan sanksi administrasi. Penerapan sanksi sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Hidup Pasal 508 Ayat 1. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH telah menindaklanjuti setiap ada pengaduan Lingkungan Hidup.</p>	
				<p>Segera dilakukan upaya untuk memperoleh akreditasi laboratorium lingkungan hidup</p>	<p>1. Pemerintah Kab.Temanggung telah melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dan telah dilaksanakan penyusunan Raperda Laboratorium Lingkungan</p> <p>2. Pemerintah Kab.Temanggung Mengajukan permohonan akreditasi laboratorium dengan persyaratan sesuai KAN K-01, KAN U-01 dan Peraturan Menteri LHK No 23 Tahun 2020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penambahan SDM Laboratorium</li> <li>- Anggaran Biaya Akreditasi</li> </ul>	<p>Terwujudnya akreditasi laboratorium lingkungan hidup</p>

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINPERMADES	Masih banyak dijumpai desa yang belum tertib administrasi keuangan baik mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi.	Perlu pendampingan dari Pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaporan terkait APBDes.	<p>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membangun aplikasi tentang kinerja desa "Simodis" dengan alur mekanisme aplikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menampilkan perencanaan pembangunan desa dalam bentuk apbdesa;</li> <li>menampilkan data rekening koran dari bank persepsi secara real time;</li> <li>menampilkan pagu dan realisasi anggaran desa (keuangan dan fisik);</li> <li>menampilkan progres kegiatan lapangan berupa foto/dokumentasi berikut tagging lokasi dengan kondisi 0%,50%, dan100%</li> </ol> <p>Petugas Input data :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Admin bank persepsi input data keuangan dari masing-masing rekening Desa;</li> <li>Tenaga Pendamping Profesional (TPP) input data awal sesuai dengan APB Desa dan foto/dokumentasi kegiatan</li> </ol>	Tertib penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban APBDesa

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>terkini (optimalisasi kinerja TPP). sistem ini menjadi salah satu bagian1 dari Optimalisasi kinerja TPP.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan Desa (Juli, Oktober, Nopember) dan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Aset Desa dilaksanakan pada bulan Mei.</p>	
				Mengoptimalkan peran pendamping desa	<p>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades telah mengadakan Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping profesional, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa.</p> <p>2. Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinpermades sudah melakukan pendampingan bersama TPP dengan membentuk Tim berbasis</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					kecamatan (Tim Fasilitasi pelaksanaan DD,ADD, BHP dan BHR yg melibatkan Pendamping Desa di tingkat kecamatan sudah terbentuk).	
		Inspektorat / BKPSDM	Desa termasuk salah satu objek pemeriksaan oleh inpektorat. Tahun 2020 hanya dapat melakukan audit di 35 desa (13,16%) dari 266 desa dikarenakan terbatasnya tenaga auditor.	Perlu tambahan tenaga auditor	Berdasarkan Rekomendasi BPKP dengan Surat Nomor 643/K/JF/2020 tanggal 15 Mei 2020, merekomendasikan jumlah JFA (Jabatan Fungsional Auditor) sejumlah 52 (lima puluh dua) orang. Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Desember 2020 memiliki Auditor sejumlah 14 (empat belas) orang dan ada penambahan sejumlah 12 (dua belas) orang, yaitu: 1. 3 (tiga) orang auditor dari PNS (formasi tahun 2019), namun ada tambahan kegiatan yang sifatnya mandatori, memenuhi penilaian indikator dalam MCP KPK dan penanganan aduan dari masyarakat. 2. 9 (sembilan) orang auditor CPNS (formasi tahun 2021).	Tambahan auditor melalui formasi CPNS, secara bertahap

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>3. Untuk tahun 2022 baru terpenuhi 26 (dua puluh enam) orang.</p> <p>4. Untuk Kekurangan personil akan dipenuhi melalui mutasi pegawai dan formasi CPNS.</p>	
4.	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Pasar Temanggung Permai belum bisa difungsikan sebagai pangkalan Angkudes sehingga kemacetan di sekitar Pasar Temanggung belum teratasi.	Perlu dilakukan renovasi akses jalan keluar masuk Pasar Temanggung Permai	Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal ini DINHUB telah menyiapkan area pelataran parkir (mangkal) angkutan umum di dalam Terminal Temanggung Permai. DINHUB juga telah melakukan renovasi akses masuk dan keluar agar mudah dilalui angkutan umum. Selain itu, DINHUB juga telah memasang rambu petunjuk masuk terminal.	Terwujudnya sistem lalu lintas angkutan jalan yang aman selamat tertib dan lancar.
				Mengfungsikan kembali Pasar Temanggung Permai sebagai tempat mangkal angkudes	Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal ini DINHUB telah melaksanakan uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas kepada sopir angkutan agar memasukkan angkutan umum ke dalam Terminal Temanggung Permai	Optimalisasi fungsi simpul transportasi berupa terminal sebagai fasilitas naik turun penumpang, tempat mangkal angkutan umum dan perpindahan moda transportasi.

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					dengan menempatkan personil petugas lapangan di setiap hari kerja.	
			Kota Parakan tidak memiliki terminal angkutan sehingga banyak kendaraan angkutan yang berhenti menunggu penumpang/muatan disembarang tempat.	Dibuat perencanaan terminal angkutan baik penumpang dan barang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam hal ini DINHUB dan DPUPR telah berkoordinasi dan membahas perencanaan pembangunan terminal Parakan yang bersinergi dengan rencana pembangunan jalur lingkaran Parakan dengan hasil disepakati untuk penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS).</li> <li>2. Penyusunan Dokumen Feasibility Study (FS) belum dapat dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2022 karena keterbatasan anggaran.</li> </ol>	Penyediaan simpul transportasi terminal sebagai fasilitas naik turun penumpang, tempat mangkal angkutan umum dan perpindahan moda transportasi
5.	Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO	Up-date data Temanggung dalam Web Resmi Pemerintah Daerah selalu terlambat	Harus dilakukan up-dating data secara berkala.	Saat ini website resmi temanggungkab.go.id sedang dilaksanakan proses kustomisasi untuk mengikuti kebutuhan, karena website lama (pengembangan 2017) banyak kebutuhan teknis dalam	Updating data dilakukan secara rutin.

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengelolaan website yang tidak terfasilitasi.</p> <p>Untuk memenuhi keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008) selalu update di website</p> <p>ppid.temanggungkab.go.id</p> <p>website temanggungkab.go.id</p>	
<b>II.</b>	<b>Urusan Pilihan</b>					
1.	Kelautan dan Perikanan	DKPPP	Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 belum ditindaklanjuti	Perlu dilakukan kajian terhadap fungsi dan potensi lain BBI	<p>1. Sesuai dengan Perda 24 Tahun 2020 UPTD BBI sudah hilang dan fungsinya ditarik ke seksi produksi perikanan, tetapi fungsi BBI sebagai penyedia kebutuhan benih ikan dengan kuantitas dan kualitas yang memenuhi syarat budidaya serta untuk pengendalian mutu benih, tetap dilaksanakan sehingga masyarakat tetap mendapatkan benih ikan sesuai dengan standart budidaya.</p>	Memaksimalkan fungsi dan potensi BBI



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2. Guna pengoptimalan potensi BBI telah dilaksanakan rehab kolam (sehingga kolam tidak bocor dari anggaran DAK Bid Perikanan Tahun 2020 sebesar Rp315.730.322,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp 173.750.000), serta rehab kolam berupa penyekatan dan betonisasi dasar kolam K11, menjadi 3 kolam berupa 2 kolam induk (jantan dan betina) dan 1 kolam pendederan, bertujuan untuk efisiensi fungsi kolam dan mempermudah pengelolaan, serta rehab saluran air/parit yang bocor. (DAK Perikanan 2021).</p> <p>3. Diterapkan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik).</p> <p>4. Dengan perbaikan sarana dan prasarana diharapkan potensi benih yang dihasilkan dalam setahun (preproduksi sekarang 150.000 ekor ) dapat mencapai 393.750 ekor. Upaya yang telah dilakukan :</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>a. Sterilisasi kolam dengan cara alami pengeringan dan pengadukan dasar kolam, pengambilan predator secara manual) tetapi upaya tersebut tidak dapat diselesaikan secara sempurna. Jika menggunakan bahan kimia dan obat-obatan tidak efektif karena berpotensi mencemarkan perairan umum dan merusak habitat kolam yang akan mempengaruhi kesuburan tanah sebagai tempat tumbuh pakan alami;</p> <p>b. Pemberian pakan tambahan seperti lemna, maggot dan pemupukan dasar kolam pemijahan dan kolam pendederan dengan pupuk organik untuk menumbuhkan plankton, (guna menghemat pakan tambahan);</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>c. Pengusulan penghapusan induk yang sudah tidak produktif, ( Penghapusan induk nila yang sudah tidak produktif dibuktikan dengan SKAI (surat Keterangan Asal Ikan) sesuai dengan prosedur teknis dan administrasi asset negara, dimana hasil penjualan penghapusan disetorkan seluruhnya ke kas Negara.)</p> <p>5. Mendukung restocking ikan di perairan umum dengan pembenihan Ikan Nilem dan uceng. Ikan nilem dan uceng merupakan ikan endemik perairan umum Kabupaten Temanggung sehingga harus dijaga kelestariannya.</p> <p>6. Pembenihan ikan uceng dilakukan secara alami dengan memanfaatkan sarana dan prasarana pembenihan yang sudah tersedia. Target produksi ikan uceng pada tahun 2022 adalah 5.000 ekor.</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>7. Pembenihan Ikan Nilem dilakukan melalui teknik penyuntikan dengan menggunakan hormon ovaprim. Target produksi ikan nilem adalah 25. 000 ekor.</p> <p>8. Pembenihan Ikan Nila dilakukan dengan sistem saph larva. Strain induk ikan nila yang digunakan adalah induk nila strain Nilasa sebagai penghasil benih nila merah dan strain induk nila gift sebagai penghasil benih ikan nila hitam.</p> <p>9. Menjaga Pelayanan Publik pada Unit Pembenihan Ikan Mungseng, salah satunya adalah dengan pembenihan ikan berbasis aman pangan dan lingkungan. permintaan konsumen. Langkah lainnya yang dilakukan adalah melalui kerjasama dengan UPR (Unit Pembenihan Rakyat) di kabupaten Temanggung dengan SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) yang dibuat.</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pariwisata	Dinbudpar & Dinpermades	Banyak desa yang memaksakan diri untuk membuat objek wisata tanpa kajian yang memadai	Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dana desa untuk pembangunan objek wisata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 tentang pedoman perencanaan Pembangunan Desa sudah diganti dengan Peraturan Bupati nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.</li> <li>2. Pengelolaan Desa Wisata harus dalam wadah BUMdes, sedangkan pendirian BUMdes harus diikuti dengan adanya analisis bisnis.</li> <li>3. Pemerintah Kabupaten Temanggung menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 95 tahun 2021 tentang Desa Wisata yang didalamnya mengatur kelembagaan, penetapan, klasifikasi, pengembangan, pengembangan daya tarik, Desa Wisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan evaluasi, dan Forum Komunikasi Desa Wisata.</li> </ol>	Pengembangan Desa Wisata dilakukan sesuai potensi desa dan regulasi yang berlaku.

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					4. Penetapan Desa Wisata dilakukan assesment sesuai dalam Peraturan Bupati tersebut.	
3.	Pertanian	DKPPP	Masih sering dijumpai kelangkaan pupuk di tingkat pengecer.	Pemerintah Daerah perlu melakukan validasi kebutuhan riil pupuk dan sekaligus melakukan koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pupuk dan menindak tegas segala penyimpangan distribusi pupuk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan koordinasi dan monev bersama tim KP3 kabupaten, provinsi, dan Kementerian Pertanian per triwulan.</li> <li>2. Usulan kebutuhan pupuk subsidi tahun 2022 dilakukan lewat sistem e- RDKK kementerian (jadwal input Juni-Oktober).</li> <li>3. Usulan tambah kurang kebutuhan pupuk subsidi secara berjenjang dari kabupaten ke provinsi dan pusat</li> <li>4. Sudah dilakukan sosialisasi pengawalan distribusi pupuk subsidi per Kecamatan</li> <li>5. Pengendalian distribusi melalui penyusunan SK alokasi dan realokasi pupuk subsidi.</li> </ol>	Tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk ditingkat pengecer dan tersedia pupuk di tingkat petani sesuai RDKK.

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
4.	Perdagangan	DINKOPDAG	Penarikan retribusi pedagang Pasar Daerah masih menggunakan sistem manual kecuali di Pasar Candioto	Agar dilakukan e-retribusi diseluruh Pasar Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Candioto sejak bulan November 2020 sudah tidak menggunakan e- Retribusi dikarenakan sistemnya trouble dan akan diganti dengan sistem baru QR Code bersama 5 (lima) Pasar Daerah yang lain.</li> <li>2. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah membuat aplikasi e-Retribusi dan pengadaan 10 unit Mobile pos (Mpos) untuk 6 (enam) Pasar Daerah. Masih terdapat kekurangan 18 (delapan belas) unit Mpos yang akan dicukupi pada tahun 2022. 4 (empat) unit Mpos dianggarkan pada APBD Tahun 2022, sedangkan 14 (empat belas) unit Mpos lagi dalam proses pengajuan CSR ke Bank Jateng.</li> <li>3. DINKOPDAG telah berkoordinasi dengan penyedia Mpos, Pembuat Aplikasi, Dinkominfo, Bank Jateng, BPKPAD dan</li> </ol>	Telah tersedia aplikasi e-Retribusi untuk Pasar Daerah

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pengelola Pasar Daerah se-Kab.Temanggung dalam rangka penggunaan e-Retribusi.</p> <p>4. e-Retribusi akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022, dikarenakan harus dilaksanakan pelatihan QR Code dan sosialisasi kepada pedagang pasar terkait penggunaan QR code dan penggunaan jaringan serta pemasangan stiker di kios-kios.</p>	
5.	Perindustrian	DPM dan Dinas Kesehatan	Masih lamanya proses legalisasi industri kecil memperoleh P-IRT	Pemerintah Daerah perlu mempercepat proses pemberian izin P-IRT.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menggunakan aplikasi OSS RBA.</li> <li>2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada</li> </ol>	Koordinasi pelayanan terintegrasi untuk P-IRT.



No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan, dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>3. Proses permohonan izin P-IRT:</p> <p>a. Pemohon mengajukan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui aplikasi OSS RBA, setelah mempunyai NIB, pemohon mengajukan permohonan UMKU untuk SPPIRT dan meng-klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga pemohon akan diarahkan ke aplikasi SPP-IRT. Pemohon SPP-IRT secara otomatis akan divalidasi oleh sistem SPP-IRT dan No PIRT akan <i>tergenerate</i> secara otomatis dari data yang diinput pelaku usaha. Penerbitan SPP-IRT serta pernyataan mandiri (<i>self declaration of comfirmity</i>)</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pelaku usaha, terbit dalam waktu 1 (satu) hari.</p> <p>b. Pernyataan mandiri tersebut berupa pemenuhan komitmen, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikuti penyuluhan keamanan pangan (nilai minimal 60).</li> <li>- Memenuhi persyaratan Persyaratan Cara Produksi pangan yang baik untuk industri Rumah Tangga(CPPB-IRT) atau higiene, sanitasi dan dokumentasi. (harus level 1-2).</li> <li>- Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.</li> </ul> <p>4. Pemenuhan komitmen oleh IRTP dan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen oleh Dinas Kesehatan dilakukan 3 (tiga) bulan sejak SPP-IRT diterbitkan untuk melihat</p>	

No.	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	TEMUAN/PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4	5	6	7
					<p>kesesuaian SPP-IRT. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan seluruh aspek pemenuhan komitmen belum terpenuhi maka pelaku usaha diberikan tenggat untuk melakukan pemenuhan dalam waktu 3 bulan sejak dikeluarkannya hasil pengawasan dari pemerintah kabupaten (c.q Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan melakukan bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan, pendampingan pemenuhan CAPA dan pendampingan pemenuhan ketentuan).</p>	

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **4.1 Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan**

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Temanggung melaksanakan program dan/atau kegiatan berupa tugas pembantuan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas pembantuan yang dilaksanakan adalah pada bidang pertanian. Adapun kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/ 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;

- 9) DIPA Nomor 018.08.4.039158/2021 tanggal 23 November 2020.
- 10) DIPA Nomor SP DIPA – 018.04.4.039152/2021 tanggal 16 Februari 2021.
- 11) DIPA Nomor 018.08.4.039158/2021 revisi ke 5 tanggal 10 Agustus 2021.
- 12) DIPA Nomor SP DIPA – 018.04.4.039152/2021 revisi 8 tanggal 17 September 2021.

#### **b. Gambaran Umum**

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 pada bidang pertanian yaitu:

- 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- 2) Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura;
- 3) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura;
- 4) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian;
- 5) Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

#### **c. Target Kinerja**

1. Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura terdiri dari kegiatan :
  - a. Fasilitasi bantuan sarana peningkatan nilai tambah hortikultura yaitu fasilitasi sarana pasca panen hortikultura 2 kelompok tani berupa bantuan sepeda motor roda tiga sejumlah 2 unit dan sarana pasca panen 2 paket.
  - b. Sarana pemasaran hortikultura 1 unit.
  - c. Sarana pascapanen hortikultura sebanyak 1 unit.
  - d. Prasarana pasca panen hortikultura dan prasarana pengolahan hortikultura di 3 Kelompok.

2. Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, ditargetkan berupa:
  - a. Pengembangan kawasan alpukat untuk 2 kelompok tani luasan per kelompok 10 hektar dengan pelaksanaan meliputi identifikasi, sosialisasi, pendampingan, pembinaan, fasilitasi bibit dan pupuk, monitoring dan evaluasi.
  - b. Pengembangan kawasan kelengkeng untuk 4 kelompok tani luasan perkelompok 10 hektar dengan pelaksanaan meliputi identifikasi, sosialisasi, pendampingan, pembinaan, fasilitasi bibit dan pupuk, monitoring dan evaluasi.
3. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura ditargetkan berupa dukungan manajemen satuan kerja yang meliputi operasional, honor dan administrasi.
4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, terdiri dari:
  - a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian dengan target sosialisasi ke kelompok penerima manfaat, pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi bantuan untuk 1 kelompok berupa irigasi perpipaan, 2 kelompok berupa irigasi perpompaan menengah, 1 kelompok berupa pembangunan embung pertanian, dan 15 kelompok rehabilitasi jaringan irigasi tersier.
  - b. Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida meliputi:
    - 1) Kegiatan Fasilitasi e-RDCK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi berupa rapat koordinasi dan evaluasi, monitoring dan evaluasi di tingkat kecamatan/ kabupaten, peningkatan kapasitas petugas entry e-RDCK.
    - 2) Kegiatan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima pupuk bersubsidi meliputi rapat koordinasi dan evaluasi, fasilitasi untuk petugas verifikasi dan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

- c. Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian yaitu fasilitasi kegiatan asuransi pertanian meliputi rapat koordinasi serta pengumpulan data di tingkat kecamatan / kabupaten.
5. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian meliputi kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi terkait dengan kegiatan yang bersumber anggaran APBN (food estate, irigasi, jalan pertanian, perpipaan, perpompaan, embung, AUTP).

**d. Realisasi**

- a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura dengan pagu anggaran Rp 880.870.000,- terealisasi sejumlah Rp 836.647.000,- atau sebesar 94,98%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Sarana pasca panen hortikultura meliputi identifikasi, koordinasi, verifikasi kelompok, pendampingan kelompok, monitoring, konsultasi serta fasilitasi bantuan sarana pasca panen hortikultura untuk 2 Kelompok Tani yaitu KT Ngudi Lestari Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo dan KT Gamblok Rejo Desa Tanggulanom Kecamatan Selopampang berupa sepeda motor roda tiga sejumlah 2 unit dan sarana pasca panen 2 paket.
  - 2) Sarana pemasaran hortikultura berupa bantuan sarana pasar tani sebanyak 1 unit untuk Gapoktan Margo Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan.
  - 3) Sarana pasca panen hortikultura untuk 1 kelompok tani yaitu KT Ngudi Lestari Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo, bantuan berupa bangsal pasca panen 1 unit dan kardus packing.
  - 4) Sarana pengolahan hortikultura meliputi verifikasi kelompok, jasa konsultan, bimtek pasca panen, honor pejabat pengadaan, honor Tim Teknis/PPHP, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi prasarana pengolahan ( Bangunan UPH ) di 3 Kelompok yaitu KT Rukun Tani Desa Kaloran Kecamatan Kaloran, KWT Kartini Desa Tegalroso Kecamatan Parakan dan YT Catering Kauman Kecamatan Parakan.
- b. Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan pagu

anggaran Rp 846.957.000,- terealisasi sejumlah Rp 752.475.000,- atau sebesar 88,84%. Realisasi capaian program tercapai 100%, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kawasan alpukat dengan bantuan 2000 bibit, pupuk organik 40.000 kg dan NPK 2.000 kg untuk 2 kelompok tani dengan luasan per kelompok 10 hektar, pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi, sosialisasi, pendampingan, pembinaan, fasilitasi bibit dan pupuk, monitoring dan evaluasi.
  - 2) Pengembangan kawasan kelengkeng dengan bantuan bibit sebanyak 8.000 bibit, pupuk organik 160.000 kg dan NPK 8.000 kg untuk 4 kelompok tani dengan luasan per kelompok 10 hektar, pelaksanaan kegiatan meliputi identifikasi, sosialisasi, pendampingan, pembinaan, fasilitasi bibit dan pupuk, monitoring dan evaluasi.
- c. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura yang ditargetkan berupa dukungan manajemen satker yakni operasional, honor dan administrasi diperoleh realisasi capaian kegiatan 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.000.000,- dari pagu anggaran Rp.21.250.000,- atau sebesar 89,41%.
- d. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan total pagu anggaran Rp. 2.053.458.000,- terealisasi sejumlah Rp 2.049.036.000,- atau 99,78%. Sedangkan realisasi capaian program tercapai 100%. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (pagu Rp 1.535.000.000 realisasi Rp 1.533.968.000 atau 99,93% dengan capaian fisik 100%, berupa:
    - a) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier terlaksana di 15 kelompok tani penerima manfaat.
    - b) Irigasi perpipaan terlaksana di 1 kelompok tani penerima manfaat (Gapoktan Makaryowono).
    - c) Irigasi perpompaan menengah terlaksana di 2 kelompok tani penerima manfaat (gapoktan Sumber Prasodjo Desa ngipik Kec Pringsurat dan KT Segudel Desa Giyono Kec Jumo).



- d) Pembangunan embung pertanian terlaksana di 1 kelompok tani penerima manfaat (KT. Amanah Makmur Desa Petarangan Kec. Kledung).
- 2) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Pagu Rp 417.910.000 realisasi Rp 415.780.000 atau 99,48% realisasi fisik 100%) meliputi kegiatan Fasilitasi e-RDKK untuk pendataan penerima pupuk bersubsidi dan Fasilitasi Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi di 20 kecamatan. Kegiatan input/entry data di aplikasi e-RDKK dilaksanakan oleh petugas entry, verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh petugas verifikasi dan validasi tingkat kecamatan, kemudian laporan hasil verifikasi dan validasi disampaikan ke dinas kabupaten setiap bulan.
- 3) Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian (Pagu Rp 16.048.000 realisasi Rp 16.048.000 atau 100% realisasi fisik 100%) memfasilitasi pendampingan kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Sosialisasi kegiatan AUTP dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan peserta petugas penyuluh pertanian lapangan dan perwakilan petani/gapoktan. Dengan sosialisasi ini diharapkan petugas dapat menyampaikan informasi terkait AUTP kepada petani/kelompok tani/gapoktan sehingga petani/kelompok tani/gapoktan bisa ikut dalam program AUTP ini.
- e. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian (Pagu Rp 84.500.000 realisasi Rp 84.240.000 atau 99,69% realisasi fisik 100%). Kegiatan ini mendukung pelaksanaan kegiatan baik fisik di lapangan maupun pendampingannya.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

**Tabel. 4.1**  
**Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan**  
**Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021**

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kementan / Dirjen Hortikultura		<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>			880.870.000,-	836.647.500,-	94,98			
1.	Kementan / Dirjen Hortikultura	DIPA Nomor SP DIPA – 018.04.4.039 152/2021 revisi 1 tanggal 16 Februari 2021	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura  <b>Output:</b> Terlaksannaya sosialisasi kegiatan, bantuan sarpras, monitoring dan evaluasi <b>Rincian Kegiatan:</b> 1) Sarana Pasca Panen Hortikultura	1. KT Ngudi Lestari Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo 2. KT Gamblok Rejo Desa Tanggulanom Kec. Selopampang	DKPPP Kabupaten Temanggung	880.870.000,-	836.647.500,-	94,98	1) Tersedianya identifikasi, koordinasi, verifikasi kelompok, pendampingan kelompok, monitoring, konsultasi serta fasilitasi bantuan sarana pasca panen hortikultura untuk 2 Kelompok Tani	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
									berupa sepeda motor roda tiga sejumlah 2 unit dan sarana pasca panen 2 paket.		
			2) Sarana Pemasaran Hortikultura	1. Gapoktan Mardi Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan					2) Terlaksannya fasilitasi bantuan sarana pasar tani sebanyak 1 unit		
			3) Sarana Pasca Panen Hortikultura	1. KT Ngudi Lestari Desa Mangunsari Kec. Ngadirejo					3) Terlaksannya bantuan berupa bangsal pasca panen 1 unit dan kardus packing		
			4) Prasarana Pengolahan Hortikultura	1. KWT Kartini Desa Tegalroso Kecamatan Parakan 2. YT Catering Kauman Kecamatan Parakan 3. KT Rukun Tani Desa Kaloran Desa Kaloran					4) Terlaksannya verifikasi kelompok, jasa konsultan, bimtek pasca panen, honor pejabat pengadaan, honor Tim Teknis/PPHP, koordinasi, konsultasi dan fasilitasi prasarana pengolahan 3 Bangunan UPH		

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			<b>2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>			846.957.000	752.475.000	88,84			
			a. Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura,								
			Rincian kegiatan : 1) Pengembangan Kawasan Kelengkeng	1) KT Tarumartani VI Desa Kertosari Jumo 2) Gapoktan Podo Rukun Desa Geblok Kaloran 3) KWT Wanita Utama Desa Kebondalem Bejen 4) Gapoktan Sido Makmur Desa Ngropoh Kranggan	DKPPP	846.957.000	752.475.000	88,84	Terlaksananya identifikasi, sosialisasi, pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, fasilitasi bibit dan pupuk sebanyak 8000 bibit, pupuk organik 160.000 kg dan NPK 8.000 kg untuk luasan kelompok 40 hektar	100	APBN
			2) Pengembangan Kawasan Alpukat	a. KT Sida Mulya Desa Legoksari Tlogomulyo b. Gapoktan Rahayu Makmur Desa Bansari Kecamatan Bansari					Terlaksananya identifikasi, sosialisasi, pendampingan, pembinaan, fasilitasi bibit dan pupuk sebanyak 2000 bibit, pupuk organik 40.000 kg dan NPK 2.000 kg untuk luasan per kelompok 20 hektar,		

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			<b>3. Program Dukungan Manajemen</b>			21.250.000	19.000.000	89,41			
			a. Kegiatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura,  <b>Output:</b> Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan  <b>Rincian Kegiatan:</b> Rapat Koordinasi dan evaluasi Perjalanan monitoring dan evaluasi Honor Perjalanan koordinasi dan konsultasi		DKPPP	21.250.000	19.000.000	89,41	Terlaksananya identifikasi, pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, ATK dan honor operasional satuan kerja	100	APBN
2	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian		<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>			2.053.458.000	2.049.036.000	99.78		100	
2.1	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.0391 58/2021 tanggal 23 Nopember 2020	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian <b>Output:</b> Terbangunnya jaringan irigasi tersier, irigasi perpipaan, irigasi	1. KT Ngudi Rahayu 2 Desa Petirrejo Kec Ngadirejo 2. KT Mutiara Tani Desa Gondosuli Kec Bulu	DKPPP	1.535.000.000	1.533.968.000	99.93	• Terbangunnya / terehabilitasinya jaringan irigasi tersier sebanyak 15 unit		

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			<p>perpompaan dan embung pertanian</p> <p><b>Rincian Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kegiatan</li> <li>2. Transfer dana dan pembangunan fisik dilapangan</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. KT Ngesti Husodo Ke Walitelon Utara Kec Temanggung</li> <li>4. KT Sido Mulyo Desa Kerokan Kec Tlogomulyo</li> <li>5. KT Sari Tani Desa Tanjungsari Kec Tlogomulyo</li> <li>6. KT Krawitan II Desa Krawitan Kec Candirot</li> <li>7. KT Manunggal Desa Ngimbrang Kec Bulu</li> <li>8. KT Amrih Mulyo Muncar Desa Muncar Kec Gemawang</li> <li>9. KT Karya Tani Desa Tempuran Kec Kaloran</li> <li>10. KT Maju Makmur Desa Getas Kec Kaloran</li> <li>11. KT Ngudi Mulyo II DEsa Samiranan Kec Kandangan</li> <li>12. KT Dewi Sinta I Desa Rowo Kec Kandangan</li> <li>13. KT Sindurejo II Desa Jumo Kec Jumo</li> <li>14. Gapoktan Catur Manunggal Desa Kundisari Kec Kedu</li> <li>15. Gapoktan Wiyoso Desa Karangtejo Kec Kedu</li> <li>16. Gapoktan Sumber Prasajo Desa Ngipik Kec Pringsurat</li> <li>17. KT Segudel Desa Giyono Kec Jumo</li> </ol>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbangunnya irigasi perpipaan sebanyak 1 unit</li> <li>• Terbangunnya irigasi perpompaan sebanyak 2 unit</li> <li>• Terbangunnya embung pertanian sebanyak 1 unit</li> </ul>		

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
				18. Gapoktan Makaryowono Desa Tlogowero Kec Bansari 19. KT Amanah Makmur Desa Petarangan Kec Kledung							
2.2	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.0391 58/2021 tanggal 23 Nopember 2020	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida <b>Output:</b> Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022  <b>Rincian Kegiatan:</b> Rapat Koordinasi dan evaluasi Perjalanan monitoring dan evaluasi Honor Petugas Verval Perjalanan koordinasi dan konsultasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		417.910.000	415.780.000	99.49	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran pupuk bersubsidi dan Tersusunya RDKK pupuk bersubsidi tahun 2022 di 20 kecamatan	100	AP
K.1.3	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.0391 58/2021 tanggal 23 Nopember 2020	Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian <b>Output:</b> Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Asuransi Usahat Tani Padi (AUTP)  <b>Rincian Kegiatan:</b> Rapat Koordinasi dan evaluasi Perjalanan monitoring dan evaluasi Perjalanan koordinasi dan konsultasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		16.048.000	16.048.000	100	Terlaksananya kegiatan pendampingan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung	100	APBN

No.	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
K 1.4	Kementan / Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA Nomor 018.08.4.0391 58/2021 tanggal 23 Nopember 2020	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Parasarana dan Sarana Pertanian <b>Output:</b> Terlaksananya Kegiatan Dukungan Manajemen Kegiatan  <b>Rincian Kegiatan:</b> Rapat Koordinasi dan evaluasi Perjalanan monitoring dan evaluasi Honor Perjalanan koordinasi dan konsultasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan		84.500.000	84.240.000	99.69	Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis kegiatan prasarana dan sarana pertanian	100	



## **4.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah**

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak melaksanakan tugas pembantuan provinsi.

## **4.3 Permasalahan dan Kendala**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah:

- a. Desain dilaksanakan tahun berjalan sehingga membutuhkan waktu untuk pelaksanaan teknis di lapangan; dan
- b. Pengerjaan teknis irigasi mundur dari jadwal yang sudah ditentukan karena bersamaan dengan musim hujan dan musim tembakau.

## **4.4 Saran dan Tindak Lanjut**

- a. Agar proses perencanaan (pekerjaan fisik) dilaksanakan pada n-1, sehingga pada tahun ke n dapat segera dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi di daerah;
- b. Pelatihan/bintek bagi petani hortikultura terutama dalam penanganan pasca panennya;
- c. Perlunya peningkatan kewaspadaan petani terhadap serangan hama penyakit;
- d. Perlunya dukungan kesiapan lokasi dan lahan serta perencanaan untuk penyusunan SID sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan lebih cepat untuk mengejar sebelum musim penghujan;
- e. Perlunya pelatihan penggunaan alat mesin pertanian baik alat sarana produksi tanam maupun peralatan pasca panen agar lebih optimal pemanfaatannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2021 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal, meskipun kita masih berada dalam bencana non alam Pandemi COVID-19. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan realisasi dari seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan realisasi seluruh aktifitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran. Keberhasilan ini merupakan sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Temanggung. Di sisi lain, masih ada beberapa program dan kegiatan yang belum berhasil dicapai, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2021 diraih berkat kerja sama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dengan didukung oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Pemerintah Kabupaten Temanggung

memberikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Temanggung yang telah mendukung agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian LKPJ. Pemerintah Kabupaten Temanggung membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran, dan kritik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Di samping itu pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Temanggung pada pembangunan jangka menengah daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Temanggung Tahun 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, pelindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan Temanggung yang **“Toto, Titi, Tentrem, Marem, dan Gandem”**.